

~ Tinjauan Pustaka ~

# KETIMPANGAN EKONOMI & GENDER DI INDONESIA

Kajian Analisa Feminisme Ekonomi

Disusun oleh:  
Masthuriyah Sa'dan

**JUDUL:**

Ketimpangan Ekonomi dan Gender di Indonesia:  
Kajian Analisa Feminisme Ekonomi

**PENULIS:**

Masthuriyah Sa'dan

**EDITOR:**

Titi Soentoro

**PEWAJAH SAMPUL DAN ISI:**

Yayaka

**CETAKAN PERTAMA:** Mei 2023

**TEBAL:** x+76

**UKURAN:** 13,5x21 cm

**DITEBITKAN OLEH:**

Aksi! for gender, social and ecological justice.  
Dengan dukungan dari European Union.



**Aksi! for gender, social and ecological justice** didirikan oleh enam feminis Indonesia pada tanggal 10 Desember 2012 dengan keinginan mempengaruhi wacana dan perdebatan mengenai pembangunan, lingkungan, dan perubahan iklim untuk memastikan perlindungan hak-hak perempuan dan komunitas mereka, serta mendukung usaha-usaha perempuan akar rumput dalam memperjuangkan hak-hak nya. Aksi! yakin bahwa memperkuat gerakan perempuan untuk keadilan pembangunan, ekonomi, dan iklim, akan memajukan hak-hak perempuan secara menyeluruh. Tiga strategi dikembangkan, yaitu membangun kapasitas untuk memberdayakan perempuan, kampanye untuk memperkuat dan memperoleh dukungan untuk suara perempuan, dan advokasi untuk perubahan kebijakan.

**Alamat:** Rambutan Raya No.79 A, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
12510, Indonesia

**Email:** [sekretariat@aksiforjustice.org](mailto:sekretariat@aksiforjustice.org)

**Website:** [www.aksiforjustice.org](http://www.aksiforjustice.org)

# Daftar Isi

---

|   |     |
|---|-----|
| <b>Daftar Singkatan</b> .....   | v   |
| <b>Pengantar</b> .....  | vii |
| <b>Pendahuluan</b> .....  | 1   |
| 1. Latar Belakang .....   | 1   |
| 2. Ketimpangan Ekonomi Menurut Pemerintah .....   | 12  |
| 3. Platform Kerja Sama Multilateral dan Lembaga<br>Keuangan Internasional .....         | 22  |
| 4. Realitas Sosial Ketimpangan Ekonomi di Indo-<br>nesia .....                          | 31  |
| <b>Hasil Kajian Pustaka</b> .....   | 35  |
| 1. Dampak Kebijakan/Program Pemerintah<br>Terhadap Kemiskinan Perempuan Indonesia ..... | 35  |
| 2. Program Lembaga Keuangan Internasional<br>dan Ketimpangan Ekonomi Perempuan .....    | 47  |
| 3. Faktor-Faktor Ketimpangan Ekonomi di Indo-<br>nesia .....                            | 60  |
| <b>Kesimpulan dan Rekomendasi</b> .....   | 67  |
| <b>Daftar Pustaka</b> .....   | 71  |
| <b>Profil Penyusun</b> .....  | 75  |



## Daftar Singkatan

---

|              |  |
|--------------|--|
| <b>ADB</b>   | Asian Development Bank (Bank Pembangunan Asia)                   |
| <b>APBN</b>  | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara                           |
| <b>BPK</b>   | Badan Pemeriksa Keuangan   |
| <b>BPS</b>   | Badan Pusat Statistik  |
| <b>IMF</b>   | International Monetary Fund (Dana Moneter Internasional)         |
| <b>KDRT</b>  | Kekerasan Dalam Rumah Tangga                                     |
| <b>KPA</b>   | Konsorsium Pembaruan Agraria                                     |
| <b>KPPA</b>  | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak                      |
| <b>PRDB</b>  | Produk Domestik Regional Bruto                                   |
| <b>PDB</b>   | Produk Domestik Bruto  |
| <b>RPJMN</b> | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional                     |
| <b>SDGs</b>  | Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) |
| <b>UMKM</b>  | Usaha Mikro, Kecil, Menengah                                     |



## Pengantar

---

**SEKITAR** 1,5% rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem yaitu USD 1.9 atau sekitar Rp 28.000 per hari di tahun 2022, menurut Bank Dunia dalam kajiannya mengenai perekonomian Indonesia yang keluar tanggal 9 Mei 2022. Selanjutnya, Indonesia sudah berhasil menghapus kemiskinan ekstrem, namun masih tetap berhadapan dengan pemicu utama kemiskinan yaitu antara lain pertanian dan bidang jasa yang sering tidak produktif atau tidak cukup untuk menghadapi kemiskinan. Selain itu perempuan yang tidak masuk dalam angkatan kerja karena terhambat secara kultural dan kerja domestik sehingga mengurangi peluang penghasilan keluarga.

Ketimpangan gender dan ekonomi serta kemiskinan memang sebuah realitas yang dihadapi rakyat Indonesia, terutama perempuan. Namun apakah penyebabnya

sesuai dengan kajian Bank Dunia tersebut, masih perlu diinterogasi oleh para perempuan yang memang berada pada garis depan situasi kemiskinan itu sendiri. Aksi! for gender, social and ecological justice telah melakukan konsultasi perempuan akar rumput dan aktivis perempuan di 10 kota Indonesia, yaitu Jayapura, Purwokerto, Makasar, Ambon, Bengkulu, Tabanan, Prapat, Kupang, Jakarta dan Palangkaraya, dan 1 konsultasi nasional dengan tujuan mendapatkan potret perempuan miskin dari berbagai sektor.

Kegiatan konsultasi memperlihatkan keragaman kausalitas kemiskinan perempuan, seperti antara lain upah buruh perempuan yang rendah; kehilangan mata pencaharian akibat kerusakan alam di sekitarnya oleh penebangan hutan, eksploitasi tambang, alih fungsi lahan ke kebun sawit ataupun akibat reklamasi pantai dan banjir rob yang menenggelamkan rumah warga di pesisir pantai. Kerusakan alam juga menghilangkan sumber air bersih. Kehilangan tersebut dan kenaikan biaya rumah tangga akibat harga bahan pokok yang melambung tinggi, mendorong banyak perempuan meminjam uang ke lintah darat dengan bunga tinggi sehingga mereka perempuan terlilit hutang. Selain itu, kasus KDRT yang dialami oleh perempuan tetap tinggi. Hasil konsultasi-konsultasi perempuan tersebut memperlihatkan bahwa ketimpangan gender dan ekonomi serta pemiskinan perempuan adalah persoalan struktural, akibat dari kebijakan pembangunan negara.

Berangkat dari hasil-hasil konsultasi di berbagai kota tersebut, kajian pustaka ini melihat definisi kemiskinan dari berbagai perspektif, seperti dari pemerintah, lembaga keuangan internasional, akademisi dan aktivis perempuan; menganalisis kausalitas (sebabakibat) situasi ketimpangan tersebut dari kerangka analisis feminis; dan menyorot program-program untuk mengentaskan kemiskinan yang ternyata tidak menyentuh akar penyebab kemiskinan itu sendiri. Banyak program bantuan mengentaskan kemiskinan lewat lembaga keuangan internasional nyatanya memiliki agenda kepentingan eksploitasi sumber daya alam Indonesia dan menjamin pasokan ke pasar global.

Kajian pustaka mengenai ketimpangan gender dan ekonomi ini diharapkan dapat memicu narasi alternatif terhadap narasi arus utama mengenai pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang berlaku, dan memicu gagasan-gagasan narasi yang lebih memihak kepada kepentingan rakyat, termasuk para perempuan.

**Jakarta, 17 Mei 2022**

**Titi Soentoro**

*Direktur Eksekutif*

*Aksi! for gender, social and ecological justice*



# Pendahuluan

---

## 1. Latar Belakang

*Aksi! for gender, social and ecological justice* telah melakukan konsultasi perempuan di 10 kota di Indonesia yaitu di Jayapura Papua, Purwokerto Jawa Tengah, Makasar Sulawesi Selatan, Ambon, Bengkulu, Tabanan Bali, Prapat Sumatera Utara, Kupang Nusa Tenggara Timur, Jakarta dan Palangkaraya Kalimantan Tengah.<sup>1</sup> Disamping mengadakan konsultasi di kota-kota tersebut, Aksi! juga mengadakan konsultasi nasional dengan menghadirkan aktivis lokal dan akar rumput di masing-masing kota. Tujuannya, mendapatkan potret perempuan miskin dari berbagai sektor sosial ekonomi.

<sup>1</sup> Titi Soentoro dan Marhaini Nasution, *Potret Perempuan dalam Ketidakadilan Gender dan Ekonomi di Indonesia, Prosiding Konsultasi Lokal di 10 Kota*, Desember 2022.

Kegiatan konsultasi tersebut melihat keragaman realita kemiskinan perempuan di 10 kota dan wilayah sekitarnya di Indonesia, seperti upah buruh perempuan yang rendah, kehilangan mata pencaharian termasuk sebagai peramu jamu akibat kerusakan alam di sekitarnya oleh penebangan hutan, eksploitasi tambang, alih fungsi lahan ke kebun sawit. Kehilangan mata pencaharian perempuan pengelola kerang juga terjadi akibat reklamasi pantai dan banjir rob yang menenggelamkan rumah warga di pesisir pantai. Kerusakan alam juga menghilangkan sumber air bersih; kehilangan sumber sumber penghasilan dan kenaikan biaya rumah tangga untuk mendapatkan air bersih mendorong banyak perempuan meminjam ke bank “*ucek-ucek*” yang berbunga tinggi sehingga mereka perempuan terlilit hutang. Selain itu, kasus KDRT yang dialami oleh perempuan tetap tinggi.<sup>2</sup>

Apa yang dialami oleh perempuan dalam kasus diatas disebabkan karena adanya bias gender dalam pengelolaan sumber daya alam dan dikontrol oleh sebuah kebijakan yang menindas perempuan. Bias gender dalam kebijakan yang menyebabkan terjadinya kemiskinan dalam stuktur kehidupan masyarakat sangat berkaitan erat dengan kerja reproduksi. Menurut Budi Wahyuni, kemiskinan yang dialami perempuan akan membawa pada persoalan yang lebih kompleks karena berkaitan dengan kualitas hidup. Wahyuni mencontohkan seperti perempuan buruh pabrik yang

<sup>2</sup> Lebih lanjut baca, Ni Ketut Sudiani dll, *Notulensi Konsultasi Nasional “Keadilan Gender dan Ekonomi untuk Perempuan”*, 6-7 Maret 2022.

mendapatkan upah rendah karena identitas gender-nya adalah perempuan. Karena upah yang diteri ma kecil sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya membuat perempuan buruh kerap kali menurunkan kualitas hidup seperti mengkonsumsi makanan murah, makanan rendah gizi dan bahkan terpaksa hidup dalam lingkungan yang serba tidak sehat.

Persoalan kemiskinan yang dialami oleh perempuan terus mengakar dan mencengkeram kehidupan perempuan karena melebarnya jurang kesenjangan sosial yang bersumber dari persoalan ketimpangan ekonomi yaitu distribusi asetaset produktif hanya kepada segelintir orang, sehingga hasil-hasil produksi masyarakat tidak berjalan di atas jalur keadilan.<sup>3</sup> Kondisi demikian disebut dengan ketimpangan ekonomi, dimana kelompok elit masyarakat menguasai sumber daya alam sedangkan kelompok masyarakat miskin, terutama perempuan tetap terpuruk secara sosial ekonomi karena tidak memiliki akses terhadap kepemilikan sumber daya alam. Ketimpangan ekonomi yang dialami perempuan mengakibatkan perempuan dimiskinkan secara sosial ekonomi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi banyak dinikmati oleh lapisan atas atau kalangan elit.

Berdasarkan hasil laporan penelitian UN Women tahun 2009, ketimpangan gender dalam ekonomi

<sup>3</sup> Budi Wahyuni, *Terpuruk Ketimpangan Gender*, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 1997. 83-85.

memiliki banyak dimensi, antara lain akses terhadap sumber daya ekonomi, akses terhadap pasar tenaga kerja, kondisi pasar tenaga kerja, kewirausahaan dan kerelaan diri antara mengurus keluarga dan bekerja.<sup>4</sup> Semua dimensi tersebut tidak sepenuhnya dimiliki oleh perempuan. Seperti temuan yang diperoleh dari konsultasi nasional Aksi!, perempuan tidak memiliki akses terhadap sumber daya alam, dan perempuan di miskinkan oleh kebijakan ekonomi dan struktur sosial politik di tanah airnya sendiri.

Berdasarkan hasil laporan Tempo tahun 2017, salah satu penyebab ketimpangan ekonomi di Indonesia adalah adanya pelepasan hutan secara besar-besaran, kemudahan perizinan tambang dan penguasaan lahan yang diberikan oleh pemerintah, banyaknya petani yang meninggalkan sektor pertanian untuk bekerja di sektor informal di kota, dan tingginya angka stunting yang dialami oleh anak-anak. Persoalan yang terjadi di Indonesia adalah penduduk miskin sebesar 27,76 juta pada tahun 2016 dan 2/3 darinya berada di pedesaan dengan pekerjaan sebagai petani dan buruh tani.<sup>5</sup>

Oxfam Indonesia juga mempublikasikan laporan penelitian tahun 2017 tentang ketimpangan ekonomi. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa meningkatnya ketimpangan ekonomi di Indonesia

<sup>4</sup> United Nation Economic Commission for Europe, *Measuring Gender Equality in the Economy*, Research Report UN, 2009.

<sup>5</sup> Laporan Khusus Ketimpangan Ekonomi, Kaya Raya Miskin Papa, Majalah Tempo edisi 20-26 Maret 2017, hal. 86-107.

karena beberapa faktor, di antaranya adalah: fundamentalisme pasar, politik yang berpihak kepada orang kaya (*political capture*), ketidaksetaraan gender, akses yang tidak setara terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, akses yang tidak setara terhadap infrastruktur dan lahan, pasar tenaga kerja dan upah yang tidak adil, dan sistem perpajakan yang tidak adil.<sup>6</sup> Tempo merilis hasil laporan pada tahun 2020 ketika Indonesia diguncang oleh pandemi Covid19, bahwa ketimpangan ekonomi naik lebih tinggi di masa pandemi. Jakarta merupakan kota tertinggi yang mengalami ketimpangan ekonomi karena tingginya angka urbanisasi.<sup>7</sup>

Pemerintah melalui Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia meluncurkan laporan hasil penelitian tahun 2022 tentang analisis ketimpangan gender spasial dan pengaruhnya terhadap perekonomian wilayah.<sup>8</sup> Penelitian ini dilakukan di 37 provinsi, dengan menggunakan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2010-2020. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kesenjangan gender pada dasarnya berangkat dari pengaruh norma sosial gender dan budaya patriarki. Disamping itu, penelitian ini juga menemukan bah-

<sup>6</sup> Luke Gibson, *Laporan Ketimpangan Indonesia, Menuju Indonesia yang Lebih Setara*, Jakarta: OXFAM Indonesia, 2017. 14-27

<sup>7</sup> <https://bisnis.tempo.co/read/1365497/maret-2020-ketimpangan-ekonomi-tumbuh-paling-tinggi-di-jakarta>

<sup>8</sup> Aktiva Primananda Hadiarta dkk, *Analisis Ketimpangan Gender Spasial dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Wilayah*, Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2022.

wa ketimpangan gender yang terjadi secara simultan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian wilayah atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Lebarnya ketimpangan ekonomi juga dipaparkan dalam laporan ketimpangan dunia (*World Inequality Report*WIR) tahun 2022 yang dirilis *World Inequality Lab*, yaitu Indonesia memiliki jutaan orang miskin yang mencakup 50% lapisan terbawah berjumlah 135 juta orang. Selain itu, buruh perempuan mengalami ketimpangan ekonomi karena upah yang rendah. Singkat kata, laporan tersebut mengindikasikan bahwa di Indonesia menghadapi ketimpangan ekonomi dan gender.<sup>9</sup> Bahkan berdasarkan indeks kemiskinan multidimensi tingkat dunia (*Global Multidimensional Poverty Index*) tahun 2022, Indonesia berada di angka ke6 ketimpangan di antara ketimpangan orang miskin di dunia.<sup>10</sup>

Ekonom Universitas Gadjah Mada, Heru Nugroho mengatakan bahwa kesenjangan atau ketimpangan ekonomi bukan merupakan proses yang alami, tetapi kemiskinan itu dikonstruksi untuk mewujudkan kemiskinan itu sendiri. Lebih lanjut, Nugroho berujar bahwa di balik kemiskinan terdapat sistem kekua-

<sup>9</sup> Lucas Chancel dkk, *World Inequality Report 2022*, World Inequality Lab UNDP. 199-200

<sup>10</sup> Sabina Alkire dkk, *Unpacking Deprivation Bundles to Reduce Multidimensional Poverty: Global Multidimensional Poverty Index 2022*, OPHI dan UNDP. 32.

saan yang menggerakkan yaitu pemilik modal atau pengusaha (kapital) dan didukung oleh negara. Akibatnya, kemiskinan yang terjadi adalah kemiskinan struktural, yaitu sebuah sistem yang menggerakkan secara serentak dan saling menguatkan terjadinya pemiskinan terhadap perempuan. Secara definisi, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Dengan kata lain, ada sebagian masyarakat yang tetap hidup miskin meskipun sumber daya alam yang dimiliki mampu membuat masyarakat tersebut terbebas dari kemiskinan. Akan tetapi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia tidak bisa diakses secara merata oleh masyarakat, sebab yang menikmati hasil alam hanya segelintir kalangan orang elit.

Dalam konteks kajian feminisme, realita kemiskinan yang dialami oleh perempuan disebut feminisasi kemiskinan (*feminization of poverty*). Konsep feminisasi kemiskinan disebut oleh Diane Pearce pertama kalinya pada tahun 1950-1970 di Amerika Serikat. Konsep ini mencakup antara lain: meningkatnya jumlah perempuan dalam kelompok miskin dan meningkatnya jumlah rumah tangga yang dikepalai perempuan dalam kelompok rumah tangga miskin. Konsep feminisasi kemiskinan mengindikasikan adanya bias gender dalam pertumbuhan kemiskinan. Dengan kata lain, kemiskinan yang dialami perempuan mengan-

dung diskriminasi, kekerasan, dan marginalisasi dalam dimensi kehidupan ekonomi dan sosial budaya.<sup>11</sup>

Penghentian kemiskinan tidak mungkin terjadi tanpa menyentuh kerangka atau akar atau faktor terjadinya kemiskinan terhadap perempuan. Sebagaimana dalam pasal 34 ayat 2 amandemen ke-empat Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Juga dalam sila ke-5 Pancasila disebutkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan tersebut dapat tercapai manakala tidak terjadi kesenjangan atau ketimpangan ekonomi dan gender yang dialami oleh perempuan. Sehingga seluruh lapisan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dan setara untuk dapat mengakses dan memiliki kontrol terhadap sumber daya alam.

Pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya program seperti bantuan dan subsidi kepada rakyat miskin dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan, seperti pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), beasiswa Pendidikan Kartu Indonesia Pintar, jaminan Kesehatan kartu Indonesia sehat, jaminan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Ja-

<sup>11</sup> Darmawan Triwibowo, *Kerentanan Perempuan Terhadap Kemiskinan: Temuan Empiris dan Tantangan Pengarusutamaan Gender*, Jurnal Perempuan edisi 74 Vol 17 no. 3 September 2012, hal. 85.

minan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan lain sebagainya. Akan tetapi program-program tersebut belum juga menyelesaikan persoalan kemiskinan. Hal itu karena masalah kemiskinan di Indonesia adalah masalah struktural, yaitu perempuan menjadi miskin karena dimiskinkan oleh sistem ekonomi, sosial budaya dan politik di Indonesia. Sehingga sumber-sumber daya alam di Indonesia hanya dimiliki segelintir orang, sehingga terjadilah kesenjangan antara masyarakat miskin yang hidup dalam kemiskinan dan masyarakat elit kaya yang hidup dalam kemewahan. Perbedaan yang tajam tersebut terjadi karena orang elit menguasai, memonopoli dan mengontrol akses sumber daya melalui sistem ekonomi dan politik. Dampaknya adalah masyarakat miskin tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki taraf hidupnya sehingga terjadilah kemiskinan struktural.

Dengan berdasarkan pada persoalan kemiskinan perempuan tersebut, maka teori feminisasi kemiskinan Diane Pearce menjadi kerangka analisa berfikir bahwa perempuan adalah kelompok masyarakat paling rentan mengalami kemiskinan dibandingkan laki-laki, di samping itu perempuan menjadi korban yang paling menderita ketika terjadi kemiskinan dalam suatu masyarakat dan negara. Kajian ini juga menggunakan kerangka interseksionalitas, yaitu melihat persoalan kemiskinan perempuan atau melihat persoalan penindasan yang dialami oleh perempuan dalam berbagai lintas disiplin baik ekonomi, sosial, politik, agama, budaya dan hukum untuk menemu-

kan titik temu. Penelitian ini akan melakukan kajian pustaka mengenai dampak kemiskinan yang dialami oleh perempuan sebagai akibat kebijakan atau program pemerintah yang berpihak kepada pengusaha dan mengorbankan kehidupan perempuan miskin sebagai kelompok rentan.

Adapun rumusan masalah dalam kajian penelitian ini antara lain: (1) Bagaimana kebijakan/program pemerintah memberikan dampak terhadap kemiskinan yang dialami oleh perempuan Indonesia?. (2) Bagaimana arahan lembaga keuangan internasional (Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional/IMF) memberikan dampak terhadap ketimpangan ekonomi dan gender kepada perempuan Indonesia?. (3) Faktor apa saja yang menyebabkan kebijakan pemerintah tidak mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan gender yang dihadapi perempuan?.

Adapun tujuan penelitian antara lain: (1) Membangun narasi tandingan dalam hal ketimpangan gender dan ekonomi dengan memperlihatkan faktor-faktor yang tidak diperhatikan atau diabaikan oleh pemerintah dalam merumuskan dan melaporkan persoalan ketimpangan gender dan ekonomi di Indonesia. (2) Membangun rumusan tuntutan perempuan dalam narasi yang lebih komprehensif sehingga perubahan struktural yang dituntut menjadi lebih efektif dalam menangani persoalan yang terlihat. (3) Membantu menyuarakan persoalan gender dan ekonomi yang dihadapi oleh perempuan miskin. Sedangkan man-

faat penelitian antara lain: (1) Hasil penelitian akan direkomendasikan kepada para pengambil kebijakan melalui kegiatan advokasi, kampanye, peningkatan kapasitas dan dialog multi stakeholder. (2) Sebagai dokumentasi pengetahuan untuk memotret realita kemiskinan perempuan di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan di atas terutama untuk mengetahui kemiskinan yang dialami oleh perempuan akibat ketimpangan ekonomi dan gender di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif kajian pustaka, dengan menggunakan sumber data dokumentasi baik berupa hasil konsultasi perempuan di 10 daerah, notulensi konsultasi nasional, buku-buku, laporan hasil penelitian, majalah, jurnal, koran dan website.

Pendekatan kajian penelitian ini menggunakan pendekatan interseksionalitas Kimberle Crenshaw, yaitu mengkritik pemahaman ketidaksetaraan dari lensa perbedaan material yang dimiliki seperti meneliti kemiskinan perempuan tidak hanya diukur dengan terminologi ekonomi, melainkan dengan ketidakadilan gender, yaitu karena beban ganda, akses kesehatan dan pendidikan yang minim, diskriminasi ras, dan hukum yang bias.

Kajian ini menggunakan analisa feminisme ekonomi yaitu dengan memasukkan isu analisa gender ke dalam ekonomi ke dalam perhitungan keberagaman pengalaman hidup perempuan, kelas, ras, dan etnis

dengan menghindari persepsi yang homogen tentang kepentingan persoalan perempuan. Feminis ekonomi digunakan dengan tujuan untuk mengubah sistem dan budaya patriarki dalam sebuah kehidupan masyarakat agar perempuan dapat berdaya tidak hanya secara ekonomi, tetapi agar perempuan dapat keluar dari jaringan kemiskinan dan untuk meningkatkan pembangunan manusia.<sup>12</sup> Oleh karena itu, kajian penelitian ini akan mencari akar ketimpangan ekonomi dan gender yang dialami oleh perempuan miskin di 10 kota.

## 2. Ketimpangan Ekonomi Menurut Pemerintah

Berbicara ketimpangan ekonomi, maka hal yang paling mudah dilihat adalah realitas kemiskinan masyarakat. Menurut penulis buku “Kemiskinan”, Muhammad Mulyadi mengatakan bahwa definisi mengenai kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan memperoleh pekerjaan, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral.<sup>13</sup> Berbeda dengan definisi kemiskinan menurut Mulyadi, Kuncoro ahli ekonomi dari Universitas Gadjah Mada mendefinisikan konsep kemiskinan sebagai perkiraan tingkat pendapatan, kebutuhan pokok dan kebutu-

<sup>12</sup> Maria Sagrario Floro dan John Willoughby, *Feminist Economic and the Analysis of the Global Economy: the Challenge that Awaits Us*, dalam *The Fletcher Forum of World Affairs*, Vo. 40:2 Summer 2016. 16-19.

<sup>13</sup> Mohammad Mulyadi, *Kemiskinan: Identifikasi Penyebab dan Strategi Penanggulangnya*, Jakarta: Publica Press, 2014. v

han dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Apabila pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum, maka orang tersebut dapat dikatakan miskin.<sup>14</sup>

Bank Dunia memberikan definisi kemiskinan bahwa orang dapat dikategorikan sebagai miskin adalah mereka yang pendapatan perharinya kurang dari USD 2.15. Sedangkan pemerintah Indonesia memberikan definisi bahwa kemiskinan diukur dengan menghitung kebutuhan pangan seseorang dalam sehari dengan ukuran satuan kalori kemudian dikalikan dengan harga. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan adalah dengan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita. Dengan peningkatan PDB, maka daerah atau provinsi dapat memacu konvergensi (intervensi pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan) dan mengurangi ketimpangan pembangunan di daerah. Pengurangan ketimpangan pembangunan berarti pemerintah daerah dapat meningkatkan tingkat pembangunan manusia, peningkatan investasi sumber daya alam yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan.<sup>16</sup>

Di masa pemerintahan presiden Joko Widodo, untuk

<sup>14</sup> Mudrajat Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Jakarta: Erlangga, 2004, 5

<sup>15</sup> World Bank, *Era Baru Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta: World Bank, 2006.

<sup>16</sup> Ari Mulianta Ginting, *Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Terhadap Kemiskinan di Indonesia 2004-2013*, dalam jurnal Kajian MPR RI, Vol 20 No. 1 Maret 2015, 49-50.

mengurangi ketimpangan ekonomi, maka kebijakan pembangunan pemerintahan difokuskan pada upaya pemerataan dan pembukaan akses terhadap fasilitas bagi masyarakat. Indikator pembangunan yang menjadi acuan pemerintah adalah pengangguran, kemiskinan dan pembangunan manusia. Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dengan indikator kemiskinan, pemerintah mengeluarkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) yang bertumpu pada 3 pilar yaitu: lahan, kesempatan dan sumber daya manusia. Tiga pilar ini bertujuan agar kebijakan pemerintah dapat diharmonisasikan menjadi satu desain kebijakan yang koheren dan efektif dalam mengurangi ketimpangan berbasis pemerataan ekonomi.

Di tingkat internasional, komitmen pemerintah dalam memastikan pembangunan manusia Indonesia berbasis gender diperkuat melalui turut sertanya negara Indonesia dalam memenuhi target pembangunan di tingkat global yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*SDGs) yang ditargetkan dapat tercapai dalam 15 tahun yakni tahun 2030. SDGs memuat 17 tujuan yang terbagi ke dalam 169 target.<sup>17</sup>

Pembangunan berbasis gender tercantum secara jelas

<sup>17</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020*, Jakarta: KPPA, 2016. 5-6. Lihat juga, *The Sustainable Development Goals Report 2022*, <https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022.pdf>

dalam Tujuan ke5 yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan dan anak perempuan. Target yang ingin dicapai dalam Tujuan ke 5 ini salah satunya adalah melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi dan juga akses terhadap kepemilikan, dan kontrol terhadap tanah dan bentuk properti lainnya seperti pelayanan finansial, warisan dan sumber daya alam yang sesuai dengan hukum nasional.

Sedangkan yang berkaitan dengan ekonomi, di dalam SDGs Tujuan ke8 adalah mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua. Adapun target yang ingin dicapai dalam tujuan ke8 ini salah satunya adalah mendorong kebijakan yang berorientasi pembangunan yang mendukung aktivitas produktif, menciptakan lapangan kerja, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi juga mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan atau permodalan.<sup>18</sup>

Melalui SDGs, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terus mendorong semua negara anggota termasuk Indonesia agar mengarahkan tujuan pembangunan yang dapat diukur dan disepakati secara universal. Dalam SDGs, prinsip *leave no one behind* (tidak meninggalkan

<sup>18</sup> Tujuan-tujuan dan target SDGs bisa di lihat <https://www.sdg2030indonesia.org/page/1-tujuan-sdg>

seorangpun) memberi arahan agar percepatan pembangunan menuju nol kemiskinan, diskriminasi dan pengecualian, mengurangi ketidaksetaraan dan kerentanan yang dapat membuat orang tertinggal dan kehilangan potensinya.

Target pencapaian SDGs tersebut kemudian diturunkan ke dalam bentuk program pemerintah melalui kementerian. Persoalan ketimpangan ekonomi dan gender masuk ke dalam agenda program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dengan nama program 3 *Ends*, yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri kesenjangan ekonomi. Dalam upaya menanggulangi kesenjangan ekonomi bagi perempuan, KPPA melakukan beberapa program unggulan antara lain (1) memastikan kementerian menjalankan program pelatihan bagi perempuan pelaku usaha, (2) memastikan setiap perempuan berhak mendapatkan akses permodalan melalui lembaga keuangan, (3) menyiapkan sistem permodalan alternatif bagi perempuan pelaku usaha mikro, dan (4) mengembangkan dukungan dana atau sarana alternatif bagi perempuan inovator.<sup>19</sup>

Agenda besar pembangunan Indonesia termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Dalam daftar proyek prioritas strategis RPJMN 2020-2024, pemerintah menjadikan

<sup>19</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Statistik Gender Tematik-Potret Ketimpangan Gender Dalam Ekonomi*, Jakarta: Lintas Khatulistiwa, 2016. 3-4

perempuan sebagai isu prioritas negara yang harus segera diselesaikan, isu tersebut adalah percepatan penurunan angka kematian ibu dan stunting dengan anggaran negara berkisar 87,1 triliun. Bahkan RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan SDGs target-target dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan beserta indikatornya telah menjadi 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan. Visi misi dalam RPJMN 2020-2024 adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Semua visi misi tersebut diwujudkan melalui 9 misi yang dikenal dengan nama Nawacita, salah satu isinya adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia dan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.<sup>20</sup>

Dalam program Nawacita jilid 2, fokus program pemerintah adalah membangun Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan produktivitas, daya saing ekspor manufaktur dan menguatkan industri hulu strategis. Untuk mewujudkan program Nawacita jilid 2 tersebut, pemerintah menetapkan enam langkah strategis antara lain: (1) penguatan iklim investasi, (2) keterbukaan perdagangan dan keterlibatan di dalam jaringan produksi global dan (3) penguatan kemampuan riset dan pengembangan inovasi serta akselerasi adopsi teknologi.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, lihat di <https://perpustakaan.bappenas.go.id>

<sup>21</sup> <https://www.jawapos.com/nasional/politik/06/03/2019/nawacita-jilid-ii-orientasinya-ke-penguatan-sdm/>

Di samping RPJMN dan Nawacita, pemerintah juga memiliki program Prioritas Nasional tahun 2022.22 Salah satu program Prioritas Nasional dalam bidang ekonomi adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, program ini bertujuan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian; industri pengolahan; pariwisata; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); serta didukung penguatan reformasi fiskal; penguatan sistem keuangan; peningkatan kualitas investasi; peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik; percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT); pemanfaatan digitalisasi; dan ekonomi hijau.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia adalah 0,384, dan jika di ukur dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia, maka ketimpangan yang terjadi di Indonesia termasuk kategori ketimpangan rendah. Pemerintah melalui BPS juga mengeluarkan profil kemiskinan di Indonesia tahun 2022. Dari total jumlah penduduk Indonesia sebanyak 275,77 juta jiwa, terdapat penduduk miskin di daerah perkotaan sebanyak 7,60%, sedangkan masya-

<sup>22</sup> *Tujuh Prioritas Nasional dalam Rancangan Kerja Pemerintah tahun 2022*, dalam <https://bbppksmakassar.kemensos.go.id/Berita/topic/129>

rakat miskin hidup di pedesaan adalah 12,53%.<sup>23</sup> Dan angka kemiskinan di Indonesia setiap tahun berubah-ubah, untuk tahun 2022 angkanya lebih rendah daripada tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan masyarakat Indonesia setiap tahun berdasarkan laporan dari data BPS berada di angka yang inkonsisten.

Pemerintah Indonesia menggunakan definisi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan dengan mengacu kepada standar definisi World Bank dalam buku *Hand-book on Poverty and Inequality* (2009). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan untuk membeli dan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin manakala memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, lemak dan lain sebagainya).<sup>24</sup>

Untuk menanggulangi kemiskinan pemerintah melakukan program Penghapusan Kemiskinan Ek-

<sup>23</sup> <https://jakselkota.bps.go.id/backend/images/PROFIL-KEMISKINAN-DI-INDONESIA-SEPTEMBER-2021-ind.jpg>

<sup>24</sup> <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#-subjekViewTab1>

strem dengan tujuan agar kemiskinan di Indonesia mencapai tingkat nol persen pada tahun 2024. 25 Program ini dilakukan dalam dua strategi, *Pertama* penurunan beban pengeluaran masyarakat. Program ini diselenggarakan dalam bentuk program bantuan sosial dan jaminan sosial, program ini antara lain; (1) bantuan sosial reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako, (2) bantuan sosial khusus berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), bantuan sosial tunai, bantuan sosial presiden dan *top up* bansos reguler, (3) pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, dan (4) bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lansia, anak dan penyandang disabilitas.

*Kedua*, peningkatan pendapatan masyarakat yang diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat. Program ini bentuknya antara lain: (1) peningkatan akses pekerjaan, (2) peningkatan kapasitas sumber daya manusia, (3) peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal dan akses penggunaan lahan, (4) pendampingan dan penguatan kewirausahaan, dan (5) pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha mikro dan makro.

*Ketiga*, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan cara bersinergi dengan kebijakan peningka-

<sup>25</sup> Penjabaran program ini mengutip di <https://sepakat.bappenas.go.id/wiki/>

tan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, melalui pemenuhan pelayanan dasar seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan dan infrastruktur sanitasi air minum layak. Kemudian peningkatan konektivitas antar wilayah seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

Program-program pemerintah untuk percepatan penghapusan kemiskinan merujuk kepada Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Program ini dijalankan dari tingkat kementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah tingkat desa atau kelurahan yang ditargetkan tuntas pada 2024 mendatang.

Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia merupakan program nasional pemerintah dengan dana bersumber dari tiga sumber pendanaan, antara lain: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana dari non pemerintah seperti perusahaan dengan bentuk dana dari CSR (*Corporate Social Responsibility*), lembaga amal filantropi baik berupa zakat, sedekah dan infaq, juga dana dari lembaga donor atau lembaga keuangan internasional.

Lembaga keuangan internasional melihat bahwa ketidakesetaraan gender memiliki hubungan yang kuat dengan kemiskinan, akses pendidikan, layanan kesehatan hingga akses keuangan. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengatakan bahwa perempuan harus diberikan akses yang sama dengan laki-laki, dan Sri Mulyani juga meminta agar pemerintah mendesain anggaran negara agar responsif gender sehingga perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dalam proses pembangunan.<sup>26</sup> Sebagaimana yang disampaikan oleh KPPA bahwa Anggaran Respon Gender (ARG) yang dimaksud adalah anggaran yang mengkomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.<sup>27</sup>

### **3. Platform Kerja Sama Multilateral dan Lembaga Keuangan Internasional**

#### **a. G20**

Indonesia merupakan salah satu anggota G20, yaitu forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama antara lain Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Bra-

<sup>26</sup> <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1811/tingkat-kan-akses-dan-partisipasi-perempuan-dalam-pembangunan-ekonomi>

<sup>27</sup> <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/d7baa-pedoman-teknis-prg-daerah.pdf>

sil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki dan Uni Eropa (EU). Berdasarkan sejarahnya, G20 berdiri pada tahun 1999 sebagai respon atas krisis ekonomi dunia pada tahun 1997-1998. Tujuan berdirinya G20 adalah memastikan dunia keluar dari krisis dan menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang kuat dan berkesinambungan. Pada mulanya, G20 merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, dan kini telah berkembang dengan pembahasan di berbagai bidang pembangunan. Sejak 2008, G20 juga mulai menghadirkan kepala negara dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT).<sup>28</sup>

G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global dan 80% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Pertemuan G20, bersamaan dengan pertemuan tahunan dana moneter internasional (IMF *International Monetary Fund*) dan group Bank Dunia (*World Bank Group*) tahun 2022 membahas enam agenda penting antara lain: (1) ekonomi global, (2) arsitektur keuangan internasional, (3) peraturan sektor keuangan, (4) investasi infrastruktur, (5) keuangan berkelanjutan dan (6) perpajakan berkelanjutan. Yang dimaksud dengan arsitektur keuangan internasional adalah komitmen G20 untuk meningkatkan ketahanan keuangan global jangka panjang dengan menga-

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/3288/berita/presidensi-g20-indonesia>

cu kepada konsep ekonomi IMF yaitu *liberalization and capital flow management* (liberalisasi dan manajemen aliran modal).<sup>29</sup>

Kegiatan internasional G20 tahun 2022 yang berlangsung di Bali, memiliki tiga sektor prioritas dan dinilai menjadi kunci bagi pemulihan yang kuat dan berkelanjutan. Tiga sektor tersebut antara lain; (1) penguatan arsitektur Kesehatan global, (2) transformasi digital, dan (3) transisi energi untuk menangani perubahan iklim secara nyata. Dalam kegiatan presidensi G20, terdapat Sembilan negara yang diundang antara lain: Spanyol, ketua Uni Afrika, ketua *the African Union Development Agency* NEPAD, ketua *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), Belanda, Singapura, Persatuan Emirat Arab, ketua *the Caribbean Community* (CARICOM), dan ketua *Pacific Island Forum* (PIF). Presidensi G20 juga mengundang 10 organisasi internasional yaitu *Asian Development Bank* (ADB), *Financial Stability Board* (FSB), *International Labour Organization* (ILO), *International Monetary Fund* (IMF), *Islamic Development Bank* (IsDB), *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), *World Bank*, *World Health Organization* (WHO), *World Trade Organization* (WTO) dan *United Nations* (UN).

#### b. Bank Dunia (World Bank)

Salah satu sumber dana yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan-

<sup>29</sup> <https://www.bi.go.id/id/g20/default.aspx>

di Indonesia adalah dengan menggunakan dana dari lembaga keuangan internasional, terutama dari Bank Dunia (World Bank), *International Monetary Fund* (IMF dana moneter internasional) dan *Asian Development Bank* (ADB). Indonesia bergabung dengan lembaga keuangan internasional pertama kalinya pada tahun 1954 di era pemerintahan presiden Soekarno dengan *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD-Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan) hingga saat ini. IBRD adalah sebuah institusi keuangan internasional yang memberikan pinjaman kepada negara berkembang dengan pendapatan menengah. IBRD merupakan bagian dari grup Bank Dunia yang bermarkas di Washington DC Amerika Serikat, didirikan pada tahun 1944. IBRD dan IDA (*Internasional Development Association*) kemudian dikenal dengan sebutan Bank Dunia (*World Bank*).

Berdasarkan data Bappenas, kebutuhan pembangunan pada RPJMN 2020-2024 yang dapat didanai oleh APBN hanya berkisar 20,25%. Oleh karena itu, pembiayaan non-APBN diperlukan untuk mengisi kesenjangan tersebut. Untuk itu pemerintah mengambil utang dari lembaga keuangan internasional. Bank Dunia telah memperbaharui hubungan kemitraan dengan pemerintah Indonesia melalui Kerangka Kerja Kemitraan (*Country Partnership Framework*) periode 2021-2025. Tiga tema lintas bidang dalam kerangka kerja antara Indonesia

dan Bank Dunia adalah digitalisasi, gender dan perubahan iklim. Sedangkan fokus kerja adalah dukungan agar Indonesia pulih dari pandemi dengan empat bidang kerja, antara lain *30 pertama*, daya saing dan ketahanan ekonomi yang lebih kuat melalui pemasukan yang lebih tinggi, serta ketahanan fiskal maupun kemampuan membayar kembali hutang, pengeluaran pemerintah yang lebih baik, berkurangnya kendala perdagangan dan investasi serta meningkatnya kedalaman, efisiensi dan ketahanan sektor keuangan.

*Kedua*, peningkatan infrastruktur melalui penguatan dan peningkatan mutu layanan, serta transisi menuju energi rendah karbon untuk mencapai akses energi universal yang dapat diandalkan serta berkelanjutan. *Ketiga*, mengembangkan modal manusia melalui perbaikan kualitas dan kesetaraan pendidikan dan keterampilan maupun gizi dan kesehatan, serta inklusifitas dan kecepatan tanggap perlindungan sosial dan pekerjaan. *Keempat*, mendukung pengelolaan aset-aset alam, sumber mata pencaharian berbasis sumber daya alam, dan ketahanan terhadap bencana yang berkelanjutan melalui penguatan pengelolaan aset-aset alam maupun lingkungan hidup serta sumber mata pencaharian berbasis pertanian dan sumber daya alam, juga ketahanan terhadap berbagai jenis bencana.

<sup>30</sup> <https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/brief/indonesia-country-partnership-framework-2021-2025>

Kerangka kerja di atas kemudian diselaraskan dengan RPJMN tahun 2020-2024 dengan berbagai macam program yang dilaksanakan di Indonesia antara lain:<sup>31</sup> (1) penguatan daya saing ekonomi dan pemulihan, (2) mengembangkan infrastruktur, (3) memelihara sumber daya manusia, (4) mempertahankan pengelolaan kekayaan alam, sumber daya alam berbasis mata pencaharian masyarakat dan ketahanan bencana. Bank Dunia melakukan kajian yang diberi nama *Country Gender Assessment* (CGA). Penilaian CGA dari Bank Dunia di fokuskan pada dua area yaitu (1) pertumbuhan dan partisipasi ekonomi perempuan, (2) meningkatkan sumber daya manusia dan kesetaraan gender.

c. International Monetary Fund (IMF)

Selain menggunakan sumber dana dari Bank Dunia, pemerintah juga menggunakan sumber dana dari *International Monetary Fund* (IMFDana moneter internasional). IMF merupakan organisasi internasional yang beranggotakan 190 negara dengan tujuan mempererat kerjasama moneter global, memperkuat stabilitas keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas lapangan pekerjaan untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia. IMF berkantor di Washington DC Amerika Serikat dan dibentuk pada tahun 1944.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Document of The World Bank Group for the Republic of Indonesia for the Period 2021-2025, 145-151

<sup>32</sup> <https://www.imf.org/en/About>

Indonesia bergabung dengan IMF pertama kalinya dimulai sejak masa presiden Soekarno, keluar dari keanggotaan dan kemudian bergabung lagi ketika masa presiden Soeharto pada Februari 1967. Kala itu IMF menjadi konsultan keuangan ketika masa Orde Baru Soeharto. Program penyesuaian struktural pertama yang disetujui IMF pada 31 Oktober 1997 berisi antara lain: (1) penyehatan sektor keuangan, (2) kebijakan fiskal, (3) kebijakan moneter, dan (4) penyesuaian struktural. Pada tahun 1998, IMF kemudian mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi struktural berisi perdagangan luar negeri dan investasi, deregulasi dan swastanisasi, *social safety net*, dan lingkungan hidup.<sup>33</sup>

Program IMF di Indonesia adalah mendukung tercapainya SDGs dengan beberapa Langkah, antara lain: (1) Membangun institusi yang kuat untuk menumbuhkan kepercayaan investor, (2) memperkuat keuangan publik untuk menjaga kesinambungan utang sambil memastikan belanja publik efisien dan tepat sasaran, (3) berinvestasi dalam infrastruktur dan sumber daya manusia, (4) memperdalam pasar keuangan dan akses sambil menjaga stabilitas keuangan, dan (5) mempromosikan inklusi sosial dan kelestarian lingkungan.<sup>34</sup> Ketika-

<sup>33</sup> [https://bisnis.tempo.co/read/1647886/indonesia-lama-menjadi-pasien-imf?page\\_num=2](https://bisnis.tempo.co/read/1647886/indonesia-lama-menjadi-pasien-imf?page_num=2)

<sup>34</sup> <https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/46/Sustainable-Development-Goals>

Indonesia dilanda wabah Covid19, program yang dijalankan oleh IMF selama kurun waktu 2021-2022 lebih kepada pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan nama program *greener economi, carbon pricing and green financing*.<sup>35</sup>

Sedangkan dukungan program yang diberikan oleh IMF kepada Indonesia yang berkaitan dengan SDGs berada di lima area utama, antara lain: pendidikan, kesehatan, air dan sanitasi, jalan, dan listrik. IMF bersama dengan Bank Dunia juga mempromosikan G20 kepada negara-negara berkembang untuk mempromosikan investasi swasta termasuk infrastruktur. Agenda IMF di negara-negara berkembang seperti Indonesia adalah mempromosikan inklusi dan keberlanjutan lingkungan dengan beberapa agenda kerja antara lain: (1) memperkuat infrastruktur dengan cara hemat biaya, mendukung peningkatan ekonomi dan meningkatkan produktifitas pertanian, (2) mengatasi ketimpangan ekonomi dan gender dengan cara mendorong inklusi ekonomi dengan cara menciptakan lapangan kerja, meningkatkan peran redistribusi kebijakan fiskal yang efisien, membuka akses layanan keuangan sambil menjaga stabilitas ekonomi negara. (3) mempromosikan keberlanjutan lingkungan dengan cara mereformasi harga energi dan karbon.

<sup>35</sup> IMF Country Report no. 22, *Indonesia Selected Issues*, International Monetary Fund, Washington D.C.

d. Asian Development Bank (ADB)

Sumber dana lain dari lembaga keuangan internasional yang digunakan oleh pemerintah Indonesia adalah *Asian Development Bank* (ADB). Kerja ADB berada di area publik dengan menawarkan pinjaman, hibah dan bantuan teknis kepada negara-negara berkembang, dan Indonesia menjadi negara anggota ADB sejak tahun 1966.<sup>36</sup>

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem di negara-negara berkembang, ADB memiliki strategi 2030, yaitu memberantas kemiskinan untuk memperluas visi agar mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusi, tangguh dan berkelanjutan. Dalam strategi 2030, ADB berperan serta dalam agenda global pembangunan infrastruktur untuk mendorong pembangunan sosial ekonomi. Adapun fokus prioritas operasional ADB antara lain:

*Pertama*, mengatasi kemiskinan yang masih ada dan mengurangi ketimpangan. *Kedua*, mempercepat kemajuan dalam kesetaraan gender. *Ketiga*, menghadapi perubahan iklim, membangun ketangguhan terhadap iklim dan bencana serta meningkatkan kelestarian lingkungan.

*Keempat*, menjadi kota ramah lingkungan, kompetitif, tangguh dan inklusif. *Kelima*, mendorong pembangunan pedesaan dan ketahanan pangan.

<sup>36</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_Pembangunan\\_Asia](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Pembangunan_Asia)

*Keenam*, memperkuat tata kelola dan kapasitas kelembagaan. *Ketujuh*, mendorong kerjasama dan integrasi kawasan.<sup>37</sup>

#### 4. Realita Sosial Ketimpangan Ekonomi di Indonesia

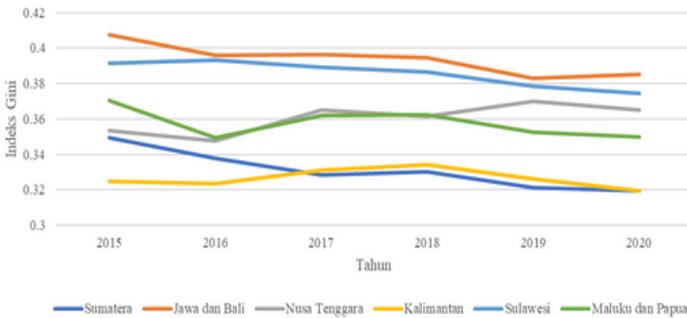
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, rata-rata indeks gini Indonesia menurut pulau menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia memiliki *trend* yang cenderung menurun. Akan tetapi, ketimpangan di masing-masing pulau tidak semuanya memiliki *trend* menurun. Pulau Jawa dan Bali justru mengalami kenaikan tingkat ketimpangan pendapatan pada tahun 2020. Kondisi ini diindikasikan merupakan dampak dari mulai menyebarnya Covid19 di Indonesia pada pertengahan Maret 2020.

Pandemi menyebabkan sebagian besar masyarakat Indonesia tidak dapat bekerja dan berimplikasi pada penurunan tingkat pendapatan dan kesejahteraan. Di sisi lain, masyarakat pada kelompok ekonomi menengah ke atas berpeluang lebih besar untuk tetap bekerja dari rumah sehingga masih dapat memperoleh pendapatan. Hal ini yang menyebabkan celah tingkat ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi pada tahun 2020, utamanya di Pulau Jawa dan Bali.

Kondisi tersebut menunjukkan distribusi pendapatan di wilayah tersebut semakin tidak merata pada tahun bersangkutan dan mengindikasikan bahwa manfaat-

<sup>37</sup> Asian Development Bank, *Strategi 2030: Mencapai Asia dan Pasifik yang Makmur, Inklusif, Tangguh dan Berkelanjutan*, Manila:ADB, 2018.

dari pertumbuhan ekonomi pun masih belum dirasakan secara maksimal oleh semua wilayah terutama wilayah timur Indonesia. Lihat grafik indeks gini Indonesia di bawah ini:



**Gambar 1. Rata-rata Indeks Gini Indonesia Menurut Pulau, 2015-2020**

Pemerintah juga memiliki data kemiskinan penduduk nasional, dengan berdasarkan pada data BPS tentang penduduk miskin. Pada Maret 2022 tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia sebesar 9,54% menurun 0,17% dari September 2021, dan menurun 0,60% pada Maret 2021. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang atau 9,54% dari total penduduk Indonesia dengan jumlah terbanyak masyarakat miskin di pedesaan sebesar 12,29% pada Maret 2022. Adapun garis kemiskinan sebesar Rp.505.469/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp.374.455 (74,08%), dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp.131.014 (25,92%).

Penghitungan data penduduk miskin yang digunakan oleh BPS adalah dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Disamping itu, BPS menggunakan sumber data utama data Survei Sosial Ekonomi Nasional (*Susenas*). Dengan demikian, yang dimaksud orang miskin menurut definisi pemerintah adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Yang dimaksud garis kemiskinan adalah penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Apabila penduduk memiliki rata-rata pengeluaran perkapita di bawah garis kemiskinan, maka oleh pemerintah dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk, referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili

oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Salah satu contoh hasil temuan Aksi! *for gender, social and ecological justice* adalah perempuan buruh tani di Jawa Tengah, tidak memiliki tanah sawah dan hidup dengan cara mencari sisa bulir padi (*ngunu*) di sawah ketika ada orang panen padi. Jika setiap harinya hasil mencari sisa bulir padi tersebut dijual, ia mendapatkan uang kurang lebih Rp.35.000/hari. Apabila uang Rp.35.000/hari tersebut dikali sebulan dalam hitungan 30 hari, maka total pendapatan perempuan tersebut adalah Rp.1.050.000/bulan. Realitasnya tidak setiap hari ada tetangga dekat yang memanen padi, dan panen padi tidak dilakukan setiap hari dalam sepanjang tahun. Apabila pendapatan perempuan tersebut sebesar Rp.1.050.000/bulan disesuaikan dengan Upah Minimum Regional (UMR) Jawa Tengah tahun 2022 sebesar Rp. 2.835.000/bulan, maka pendapatan perempuan pencari sisa bulir padi jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh pemerintah Jawa Tengah. [A]

## Hasil Kajian Pustaka

---

### **1. Dampak Kebijakan/Program Pemerintah Terhadap Kemiskinan Perempuan Indonesia**

Kebijakan atau program pemerintah yang berdampak terhadap kemiskinan perempuan di Indonesia antara lain: peningkatan investasi dan pasar global, reformasi agraria, pengelolaan sumber daya alam, ritel modern untuk pasar tradisional, pemberian bantuan sosial, akses layanan peminjaman atau permodalan untuk perempuan dan pembangunan infrastruktur jalan. Program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan tersebut menimbulkan dampak yang sulit terurai, yaitu kemiskinan yang dialami oleh perempuan. Sehingga yang terjadi adalah program pengentasan kemiskinan justru melahirkan kemiskinan berkelanjutan.

Adapun dampak-dampak kebijakan atau program terhadap kemiskinan perempuan di Indonesia antara lain:

a. Rendahnya Upah Buruh Perempuan

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin) terus meningkatkan upaya investasi baik dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan meningkatkan sektor industri terutama industri manufaktur dan garmen. Peningkatan sektor industri tersebut nantinya dibarengi dengan pembukaan lapangan kerja baru untuk memacu investasi secara lebih masif.

Investasi manufaktur sangat didorong oleh pemerintah dengan tujuan untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid19. Bagi pemerintah, investasi manufaktur memberikan hasil yang banyak kepada perekonomian negara dari penerimaan devisa pajak dan ekspor serta penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah melakukan program baru untuk meningkatkan investasi yaitu dengan perluasan kawasan industri, salah satunya adalah kawasan industri halal.<sup>1</sup>

Program pemerintah disamping peningkatan investasi, pemerintah juga meningkatkan pasar global. Menurut Kementerian Koordinator Bidang-

<sup>1</sup> Lihat <https://kemenperin.go.id/artikel/19916/Pacu-Investasi-Industri-Lebih-Masif,-Pemerintah-Relaksasi-DNI>

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia bahwa peran penting perempuan dalam pembangunan berada di empat sektor utama yaitu bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan pencegahan kekerasan. Di bidang ketenagakerjaan, pemerintah fokus pada memperluas kesempatan kerja, mendorong fleksibilitas pasar tenaga kerja, menyesuaikan gaji dengan mekanisme pasar, memperbaiki keterampilan dan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan untuk perempuan, dan menguatkan implementasi tenaga kerja yang mengakomodasi kesetaraan gender.<sup>2</sup>

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan bahwa perempuan adalah aset, potensi dan investasi penting bagi Indonesia yang dapat berkontribusi secara signifikan sesuai dengan kapabilitas dan kemampuannya. Penulis melihat jika pemerintah dan swasta telah membuka akses kesempatan kerja kepada perempuan dengan tujuan untuk mencapai kesetaraan gender. Akan tetapi, kesetaraan gender tersebut hanya diukur pada akses kesempatan kerja dan bukan kepada nominal upah yang didapat oleh buruh perempuan, sehingga kesempatan kerja yang diberikan justru menjadi ladang eksploitasi perempuan. Dampaknya adalah keadilan gender bagi buruh perempuan masih jauh dari pencapaian SDGs.

<sup>2</sup> <https://www.kemenkopmk.go.id/optimalisasi-peran-perempuan-dalam-pembangunan>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ILO pada tahun 2013, perempuan memperoleh upah rata-rata 81% dari laki-laki dengan pendidikan dan pengalaman yang sama. Bahkan perempuan rentan yang bekerja di sektor informal seperti perusahaan manufaktur atau tekstil seringkali mendapatkan upah di bawah distribusi upah pada umumnya yang menjadikan perempuan mendapatkan diskriminasi di tempat kerja. Diskriminasi tersebut terjadi karena sektor informal memiliki tuntutan lebih sedikit dalam hal kompensasi dan perlindungan pekerja, sehingga barang dapat diproduksi dengan biaya lebih rendah yang memungkinkan perusahaan memperoleh bahan masukan lebih murah. Diskriminasi upah pada tenaga kerja berakar pada argumentasi bahwa meskipun perempuan kerap melaksanakan tugas-tugas dalam pekerjaan informal yang mirip dengan atau diperlukan untuk produksi di sektor informal, perempuan tidak memiliki upah yang kompetitif karena mereka tidak memiliki akses ke perlindungan hukum, akses manfaat dan keberlanjutan kerja di sektor informal.<sup>3</sup>

LIPi yang sekarang berganti nama menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga melakukan penelitian pada tahun 2014 bahwa persoalan diskriminasi upah perempuan bersumber pada norma-norma patriarki yang menghambat parti-

<sup>3</sup> ILO, *Labour and Social Trends in Indonesia 2011: Promoting Job-Rich Growth in Provinces*, Jakarta: ILO, 2012.

sipasi angkatan kerja. Sebab perempuan memiliki peran dan tanggungjawab kerumahtanggaan, status subordinat perempuan dalam relasi gender dan sikap patriarki terhadap partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi dan masyarakat. Perempuan bekerja di luar rumah dianggap sebagai tambahan atau membantu ekonomi keluarga, bahkan perempuan harus menerima kenyataan bahwa dia akan memiliki beban tanggung jawab ganda.<sup>4</sup>

Secara hukum, persoalan diskriminasi upah buruh perempuan juga disebabkan oleh adanya Surat Edaran Menaker No. SE/07/1990 tentang pengelompokan upah yang mana pada pengaturan tersebut menetapkan mengenai tunjangan yang diberikan kepada pekerja. Tunjangan tersebut hanya diberikan kepada istri dan anak, sedangkan perempuan yang telah menikah dan bekerja tidak berhak atas tunjangan suami dan anak.<sup>5</sup> Diskriminasi terhadap perempuan yang telah menikah ini mampu memperlebar kesenjangan upah yang diterima perempuan.

#### b. Perampasan Lahan dan Kriminalisasi

Salah satu program pemerintah adalah reforma agraria, yaitu penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

<sup>4</sup> Hennigusnia, *Kesenjangan Upah Antar Gender di Indonesia, Glass Ceiling atau Sticky Floor*, Jurnal Kependudukan Indonesia Vol. 9 No. 2 Desember 2014.

<sup>5</sup> <https://www.gadjian.com/blog/wp-content/uploads/2018/01/Surat-Edaran-Menteri-Tenaga-Kerja-SE-07-MEN-1990.pdf>

tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Adapun tujuan dari reforma agraria adalah mengatasi berbagai persoalan umum di bidang agraria, sosial, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, antara lain: (1) ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, (2) menyelesaikan sengketa dan konflik agraria, (3) alih fungsi lahan pertanian yang masif, (4) turunnya kualitas lingkungan hidup, (5) kemiskinan dan pengangguran, (6) kesenjangan sosial.<sup>6</sup>

Program reforma agraria untuk masyarakat ekonomi ke bawah memberikan dampak negatif, sebab di kalangan masyarakat terutama petani terjadi sengketa tanah hingga berujung kriminalisasi petani, bahkan hingga pembunuhan. Berdasarkan catatan Mongabay, reforma agraria alih-alih untuk melindungi petani Indonesia, kebijakan pemerintah justru mengambil ruang hidup, kriminalisasi petani dan pejuang lingkungan serta merusak ekosistem lingkungan.<sup>7</sup>

Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), konflik yang bisa terekam dalam 10 tahun belakangan adalah 1.395 korban krimi-

<sup>6</sup> [https://www.kominfo.go.id/content/detail/13688/reforma-agraria-menjamin-pemerataan-sosial-ekonomi-masyarakat-secara-menyeluruh/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/13688/reforma-agraria-menjamin-pemerataan-sosial-ekonomi-masyarakat-secara-menyeluruh/0/artikel_gpr)

<sup>7</sup> <https://www.mongabay.co.id/2017/09/28/kala-reforma-agraria-masih-jauh-dari-harapan/>

nalisis, 85 orang meninggal dunia dalam memperjuangkan hak atas tanah dan kekayaan alam. Jumlah tersebut dilihat sebanyak kasus 472 konflik agraria di seluruh Indonesia dengan luasan 2.860.977,07 hektar. Bahkan menurut KPA, konflik agraria telah melibatkan 105.887 keluarga. Dengan adanya data kasus konflik lahan akibat program reforma agraria yang digaungkan oleh pemerintah. Sejatinya program tersebut yang bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat miskin, justru membuat masyarakat miskin semakin miskin, terutama perempuan.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf bahwa perampasan tanah (akuisisi) yang terjadi di Indonesia seperti Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi mendapat dukungan dari Bank Dunia. Bank Dunia beranggapan bahwa akuisisi tanah secara luas lewat 3 mekanisme, merupakan sebuah jalan untuk mengurangi kemiskinan. Tiga mekanisme tersebut adalah penciptaan lapangan kerja tenaga upahan, peluang bisnis bagi tenaga kontrak, dan pembayaran sewa dan pembelian tanah. Padahal dalam catatan panjang sejarah perkebunan besar seperti tebu, karet dan kelapa sawit telah gagal mengurangi kemiskinan dan justru sebaliknya semakin membuat masyarakat Indonesia menjadi miskin.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Muhammad Yusuf, *Transisi Agraria dan Ketenagakerjaan Pedesaan*, Jurnal Studi Pemuda Vol. 2 No. 1 Mei 2013.

Perampasan tanah dan lahan yang dilakukan oleh perusahaan kepada petani mendapat perlindungan dari pemerintah. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang no. 2/2007 tentang Penanaman Modal dengan berbagai turunannya, kebijakan ini memberikan peluang kepada investor untuk semakin menguasai sumber-sumber agraria. Disamping itu, intruksi Presiden no. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 termasuk didalamnya mengatur investasi pangan skala luas (*food estate*). Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada pengusaha dan investor untuk mengembangkan perkebunan tanaman pangan. Dalam skala yang lebih tinggi, kebijakan yang memberikan kelonggaran kepada pengusaha untuk melakukan akuisisi tanah dan lahan adalah Peraturan Presiden no. 77/2007 tentang daftar bidang usaha tertutup dan terbuka. Dalam Perpres tersebut tertulis bahwa asing boleh memiliki modal maksimal 95% dalam budi daya padi.

### c. Penggusuran Masyarakat Adat

Program yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat sekitar hutan adalah program Perhutanan Sosial. Program ini diciptakan untuk mewujudkan keharmonisan antara peningkatan kesejahteraan dengan kesetaraan dan pelestarian lingkungan. Program Perhutanan Sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

melalui pola pemberdayaan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan. Program ini akan membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan.<sup>9</sup>

Melalui program tersebut, pemerintah membagi hutan di Indonesia menjadi tiga jenis hutan sosial, yaitu hutan kemasyarakatan, hutan desa dan hutan tanaman rakyat. Melalui skema tersebut, pemerintah memberikan hak kepada masyarakat yang tinggal di dalam hutan dan sekitar hutan untuk mengelola hutan secara lestari dan ramah lingkungan. Dengan demikian, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dan di dalam hutan memiliki hak mengelola hutan untuk hidup dan memberi penghidupan.

Program pengentasan kemiskinan kepada masyarakat miskin yang tinggal di dalam hutan dan sekitar hutan utamanya kepada masyarakat adat menimbulkan dampak buruk. Sebab implementasi program tersebut menimbulkan masalah, hal itu karena hutan dimiliki dan dikelola oleh perusahaan, dan masyarakat adat tidak memiliki akses untuk memanfaatkan hutan sebab digusur dari ruang hidupnya. Hutan yang memberikan peng-

<sup>9</sup><http://pkps.menlhk.go.id/akps/web/index.php?r=site%2Ftentang>

hidupan kepada masyarakat tidak lagi menjadi sumber penghidupan, sebab hutan menjadi milik perusahaan, sehingga menyebabkan masyarakat adat yang miskin semakin miskin.

Penggusuran masyarakat adat mendapat perlindungan hukum baik melalui hukum nasional maupun kebijakan pemerintah seperti pasal dalam Undang-Undang Pokok Agraria no. 5/1960 yang mengatur hak ulayat, masyarakat adat dan hukum adat. Fakta di lapangan, Undang-undang ini justru mempermudah pengambilan sumber-sumber agraria oleh negara sehingga terjadi sengketa di berbagai hutan adat di Indonesia. Disamping itu, dalam Undang-Undang no. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa telah menyeragamkan pemerintahan terkecil dalam hirarki pemerintahan di Indonesia melalui bentuk desa atau kelurahan, sehingga otonomi dan identitas masyarakat adat dimusnahkan oleh penggusuran-penggusuran yang dilakukan demi pengembangan berbagai proyek pembangunan seperti desa wisata, desa tangguh dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

#### d. Tidak Mendapatkan Bantuan Sosial/Bantuan Tidak Tepat Sasaran

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial di lingkungan kementerian

<sup>10</sup> M. Syamsuddin, *Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 15 Juli tahun 2008.

Sosial.<sup>11</sup> Disebutkan dalam pasal 1 bahwa bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu atau rentan terhadap resiko sosial. Pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bentuk amanah Pancasila sila ke 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, tujuan pemberian bantuan sosial adalah untuk menanggulangi kemiskinan bagi individual atau keluarga atau kelompok sosial yang tidak memiliki mata pencaharian atau tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Program bantuan sosial yang diberikan baik berupa uang tunai maupun bahan makanan pokok melalui program yang bernama bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan lain sebagainya. Seluruh data penerima manfaat program bantuan sosial tersebut termuat di data Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KOMINFO) yang disebut dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data ini memuat 40% penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan atau memiliki status kesejahteraan sosial terendah.

Bantuan sosial yang sejatinya untuk kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal ini perempuan

<sup>11</sup> <file:///C:/Users/hp/Downloads/PERMENSOS%20NOMOR%201%20TAHUN%202019.pdf>

sebagai kelompok rentan baik perempuan janda maupun perempuan lansia, dilapangan tidak sepenuhnya berjalan seperti yang tertuang dalam aturan. Sebab kenyataan yang ada, seringkali bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran bahkan banyak perempuan miskin yang seharusnya masuk dalam kategori penerima manfaat bantuan justru tidak memiliki akses mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

Berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), kesalahan penyaluran bansos telah mengakibatkan kerugian negara hingga 6,9 triliun rupiah baik di bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Menurut BPK, faktor-faktor bantuan tidak tepat sasaran antara lain: *Pertama*, ada penerima bansos tahun lalu yang sudah meninggal dunia tapi masih terdata di data Keluarga Penerima Manfaat (KPM). *Kedua*, penerima bansos tidak ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan tidak ada usulan dari pemeritah daerah. *Ketiga*, penerima bansos yang bermasalah pada tahun sebelumnya masih ditetapkan sebagai penerima bansos di tahun berikutnya. *Keempat*, penerima bansos dengan nomor NIK tidak terdaftar. *Kelima*, penerima sudah di nonaktifkan tetapi masih diberikan. *Keenam*, penerima bansos mendapatkan bantuan ganda.<sup>12</sup> Kesalahan-kesalahan

<sup>12</sup> <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=35712>

dalam proses pendistribusian bantuan tersebut yang dilakukan oleh pemerintah disebut oleh ombudsman sebagai maladministrasi.<sup>13</sup>

## 2. Program Lembaga Keuangan Internasional dan Ketimpangan Ekonomi Perempuan

### a. Bank Dunia

Bank Dunia menyatakan membantu perekonomian Indonesia untuk rencana pembangunan jangka 20 tahun dari tahun 2005 hingga 2025. Rencana tersebut dibagi menjadi rencana jangka menengah 5 tahun yang disebut dengan RPJMN. Setiap rencana memiliki prioritas yang berbeda-beda. Rencana pembangunan bertujuan untuk memperkuat perekonomian Indonesia dengan meningkatkan modal manusia dan daya saing di pasar global.<sup>14</sup> Program Bank Dunia untuk peningkatan ekonomi di Indonesia dan untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem antara lain:<sup>15</sup>

#### 1) Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH telah dimulai sejak tahun 2007 melalui Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin terutama perempuan yang memiliki anak sekolah dengan tujuan

<sup>13</sup> <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--bansos-tidak-tepat-sasaran-adalah-maladministrasi>

<sup>14</sup> Data ini berdasarkan pada dokumen Bank Dunia, "*Document of the World Bank Group for The Republic of Indonesia for the period FY21-FY25*". Lihat juga di <https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/overview>

<sup>15</sup> Data ini sepenuhnya berdasarkan pada data Bank Dunia melalui website <https://www.worldbank.org/in/country/indonesia>

untuk mengakhiri siklus kemiskinan di kalangan penduduk termiskin. Pada tahun 2014, program PKH telah menjangkau masyarakat miskin sebanyak 3 juta orang di 33 propinsi di Indonesia. Program ini memberikan bantuan uang tunai sebanyak Rp.800.000/bulan kepada penerima manfaat.

Pada tahun 2020, Bank Dunia memberikan dukungan sebesar USD 98 juta atau setara Rp.1,392 triliun untuk membantu keluarga miskin melalui program Pendanaan Tambahan untuk Reformasi Bantuan Sosial. Bantuan tersebut diperuntukkan untuk menambah jumlah bantuan tunai bagi masing-masing penerima manfaat PKH untuk ketahanan ekonomi pada masa pandemi Covid19.

Sepintas program tersebut terlaksana seperti rencana dan penerima manfaat bantuan adalah penduduk miskin dengan berdasarkan data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Akan tetapi, realita yang terjadi di lapangan tidak demikian. Berdasarkan hasil konsultasi yang dilakukan oleh Aksi di 10 kota di Indonesia. Bantuan PKH yang diberikan oleh pemerintah seringkali tidak tepat sasaran bahkan perempuan yang tergolong betul-betul miskin sulit untuk mengakses dana bantuan.

## 2) Program Percepatan Reformasi Agraria

Program ini dilakukan karena parahnya dampak perubahan iklim sehingga Bank Dunia mendukung upaya pengelolaan lanskap secara terpadu (*Sustainable Landscapes Management Program*) untuk mengurangi deforestasi dan emisi karbon, meningkatkan mata pencaharian, melindungi keanekaragaman hayati juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Program ini meliputi enam area fokus, antara lain: (1) administrasi dan tata kelola pertanahan yang lebih baik, (2) pengembangan pertanian berkelanjutan di lanskap prioritas Indonesia, (3) pertumbuhan yang inklusif dan adil di lanskap pedesaan, (4) pembiayaan berkelanjutan untuk pengelolaan lanskap, (5) meningkatkan koordinasi, komunikasi dan pelibatan pemangku kepentingan.

Bank Dunia juga melakukan program percepatan reformasi agraria dengan nominal bantuan sebesar USD 240 juta dengan pelaksana program yaitu Kementerian Agraria Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga Badan Informasi Geospasial (BIG). Bantuan tersebut juga mendapat dukungan dari *Sustainable Landscape Management Multi Donor Trust Funds*. Program ini lebih banyak bergerak di sektor agrikultur, perikanan dan kehutanan.

Melalui program tersebut, Bank Dunia mendukung Indonesia dalam meningkatkan kejelasan terkait hak-hak atas lahan dan pemanfaatan lahan di kawasan luar hutan di pulau Sumatera dan Kalimantan.

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sangat penting untuk kepentingan dunia global, sebab hutan dan ekosistem darat yang sehat berpengaruh kepada kelangsungan hidup manusia, yaitu sebagai sumber ketahanan pangan, sumber bahan bakar, tempat berlindung, sumber pekerjaan, sumber perlindungan dari banjir dan untuk menyerap emisi karbon. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia yang bisa dijadikan kebanggaan dunia antara lain mangrove, lahan gambut, dan hutan tropis.

Melalui program reforma agraria yang dilakukan oleh pemerintah dengan dukungan dana dari Bank Dunia, sumber daya alam di Indonesia sebagai sumber kekayaan alam nusantara dieksploitasi untuk kepentingan pasar global. Hal itu karena Bank Dunia memberikan bantuan dana pinjaman kepada pemerintah untuk menjalankan program sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN, yang mana nantinya hasil dari program tersebut adalah untuk kepentingan pasar global. Program inilah yang kemudian berdampak terhadap pemiskinan perempuan, sebab perempuan kehilangan mata pencaharian

karena perampasan lahan untuk kepentingan perusahaan, perempuan menjadi korban KDRT karena persoalan ekonomi dalam keluarga, dan dampak buruk berkepanjangan lainnya.

### 3) Penguatan Perhutanan Sosial

Bank Dunia juga memberikan pendanaan pada program penguatan Perhutanan Sosial yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK), juga disertai dengan program penguatan hak dan perekonomian masyarakat adat yang tinggal di dalam hutan dan sekitar hutan. Proyek ini terdiri dari beberapa komponen, antara lain:

(1) penguatan kebijakan untuk mendukung Perhutanan Sosial untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan dan penguatan Perhutanan Sosial di Indonesia. (2) Penguatan kapasitas dan manajemen komunitas adat yang tinggal di dalam hutan untuk mendukung implementasi program Perhutanan Sosial. (3) melakukan monitoring dan evaluasi untuk implementasi proyek.

Melalui program Penguatan Perhutanan Sosial, Bank Dunia juga melakukan program Penguatan Hak dan Perekonomian Masyarakat Adat. Satu sisi program Perhutanan Sosial menimbulkan dampak buruk kepada masyarakat adat, yaitu hilangnya hak kepemilikan tanah masyarakat adat yang tinggal di dalam hutan dan sekitar

hutan, sehingga membuat perempuan adat berada dalam lingkaran hidup kemiskinan, tetapi disisi yang lain, masyarakat adat diberi pelatihan kapasitas tentang penguatan hak dan ekonomi agar bisa keluar dari garis kemiskinan.

#### *4) Indonesia Sustainable Oceans Program (ISOP)*

Bank Dunia juga memberikan dukungan pendanaan guna mewujudkan arah kebijakan pemerintah menuju Ekonomi Biru. Yang dimaksud dengan kebijakan ekonomi biru yaitu penambahan luas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, juga pembersihan sampah plastik di laut melalui pelibatan nelayan.<sup>16</sup>

Dukungan program dari Bank Dunia menuju Ekonomi Biru antara lain dengan mendukung perikanan berkelanjutan dan mata pencaharian pesisir, membangun ekosistem pesisir dan laut yang sehat, dan mengurangi polusi laut. Untuk mewujudkan program tersebut, Bank Dunia memperluas investasi sektor swasta dengan cara memberikan dukungan finansial dan kelembagaan pada perusahaan yang berinvestasi pada praktek penangkapan ikan yang berkualitas

<sup>16</sup> <https://kkp.go.id/artikel/46569-menteri-trenggono-siapkan-program-ekonomi-biru-untuk-berkontribusi-capai-target-ndc>

tinggi dan pengelolaan laut berkelanjutan serta pengembangan kelautan. Disamping itu, Bank Dunia juga membangun infrastruktur baik fisik maupun logistik berupa pelabuhan dan jaringan untuk meningkatkan pasar ikan lokal bertaraf internasional.

Untuk mewujudkan program tersebut, Bank Dunia mendukung kebijakan kelembagaan yang dibuat oleh pemerintah di tingkat nasional yaitu Peraturan Presiden nomor 34 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Maritim Indonesia.<sup>17</sup> Dalam pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa rencana aksi kebijakan kelautan Indonesia yang selanjutnya disebut Rencana Aksi adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan kelautan dengan target pembangunan nasional.

Rencana Aksi tersebut dilakukan dengan tujuan agar Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Maksud dari Poros Maritim Dunia adalah Indonesia menjadi negara maritim yang besar, kuat dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Untuk menuju negara Poros Maritim Dunia, pemerintah melakukan pembangunan maritim dari aspek infrastruktur, revitalisasi sektor-sektor

<sup>17</sup> [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176660/Salinan\\_Perpres\\_Nomor\\_34\\_Tahun\\_2022.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176660/Salinan_Perpres_Nomor_34_Tahun_2022.pdf)

ekonomi kelautan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kelautan. Untuk mewujudkan negara Poros Maritim Dunia maka terdapat beberapa pilar yang dicanangkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah pengembangan industri perikanan dan mendorong pengembangan infrastruktur dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, industri perkapalan dan pariwisata maritim.

Program ISOP yang dijalankan oleh Bank Dunia melalui skema prioritas RPJMN 2020-2024 menjadikan laut baik isi di dalam laut dan apa yang ada di sekitar laun Indonesia sebagai industri yang menghasilkan keuntungan sehingga Bank Dunia memberikan bantuan kepada pihak swasta untuk melakukan investasi pemanfaatan potensi laut dengan mengindahkan kehidupan yang ada di laut itu sendiri. Dampaknya perempuan nelayan menjadi orang pertama yang terdampak terhadap kebijakan kelautan di Indonesia. Singkat kata, cita-cita Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sejatinya memberikan pengaruh buruk terhadap keberlangsungan ekonomi perempuan nelayan, biota laut dan kehidupan masyarakat pesisir.

#### b. ADB

Pembiayaan ADB di Indonesia berpusat pada infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan tata kelola ekonomi. Berikut program dari ADB yang memiliki pengaruh kepada kemiskinan perempuan di Indonesia, antara lain:

1) *Neighborhood Upgrading and Shelter Project* (NUSP) Pembiayaan program perbaikan lingkungan kumuh oleh ADB bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup, juga mendukung upaya pemerintah untuk mencapai pertumbuhan inklusif dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2019, jumlah penerima manfaat sebanyak 670 ribu keluarga dan tersebar di 20 kota di Indonesia termasuk Bima, Makassar, Jakarta, dan lain sebagainya.

Salah satu pembangunan proyek ini dilaksanakan di kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Masyarakat yang tinggal di tepi sungai selalu diterjang banjir karena adanya alih fungsi lahan dan penebangan hutan secara besar-besaran di aliran hulu sungai, sehingga membuat rumah warga yang tinggal di pinggiran sungai kehilangan rumah karena dibawa oleh arus sungai dan terendam banjir. Pemerintah Bima kemudian merancang perpindahan masyarakat sebanyak 3.000 keluarga ke rumah baru proyek investasi ADB, kemudian pemerintah menandatangani kontrak dengan Badan Kerjasama Internasional

Jepang untuk proyek ruang terbuka di tepi sungai Bima. Dari adanya proyek tersebut, pemerintah kemudian mensterilkan area selebar 5 meter tepat di sebelah sungai. Warga yang menolak, di gusur paksa aparat pemerintah.

Kriteria masyarakat yang bisa menempati kawasan perumahan tersebut sangat ketat yaitu mereka yang berada di bawah garis kemiskinan nasional. Karena banyaknya masyarakat yang mendaftar perumahan tersebut sebagai korban penggusuran dan banjir, maka tidak semua mendapatkan kesempatan menempati perumahan subsidi pemerintah. Proyek perumahan untuk mengatasi kemiskinan ini tidak menyentuh akar kemiskinan itu sendiri, yaitu banjir akibat alih fungsi lahan dan penebangan hutan sehingga masyarakat kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian dan hidup miskin. Investasi ADB untuk bantuan perumahan nyatanya tidak menyentuh kepada akar persoalan kemiskinan perempuan.

- 2) *Investasi Kesehatan Untuk Ibu, Bayi dan Anak* di sektor kesehatan, ADB juga memberikan investasi kepada pihak swasta untuk mendukung layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan mempromosikan cakupan layanan Kesehatan universal di Indonesia yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pihak swasta tersebut adalah PT. Medikaloka Hermina Tbk (Hermina),

antara lain untuk Rumah Sakit Hermina Wonogiri di Jawa Tengah, dan rumah sakit Hermina di berbagai kota di Indonesia lainnya. Nilai investasi sebesar 10 juta USD (pembiayaan langsung) dan mengelola 10 juta USD dari Dana Infrastruktur Swasta Utama di Asia yang dibentuk oleh Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA) pada tahun 2016 untuk pembangunan infrastruktur sektor swasta rumah sakit.

Layanan kesehatan melalui JKN bertujuan untuk mengurangi angka stunting di Indonesia, memberikan perawatan kesehatan bagi ibu dan anak sebelum, selama, dan setelah melahirkan serta perawatan intensif neonatal untuk anak tumbuh kembang yang sehat.

Kasus stunting bagi anak di Indonesia terjadi karena kurangnya asupan nutrisi ketika ibu hamil dan ketika anak tumbuh kembang. Umumnya anak stunting dialami oleh keluarga yang berada dalam taraf hidup miskin, karena kurangnya asupan nutrisi ketika mengonsumsi makanan. Kemiskinan yang terjadi karena keluarga tersebut tidak memiliki penghasilan yang cukup atau tidak memiliki pekerjaan. Namun tidak semua perempuan miskin bisa mengakses layanan kesehatan nasional atau JKN, sebab bantuan kesehatan seringkali diberikan kepada orang-orang terdekat penyalur bantuan. Akibatnya, bantuan layanan kesehatan itu tidak mera-

ta, bahkan tidak tepat sasaran. Bantuan investasi kesehatan yang diberikan oleh ADB kepada ibu dan anak, nyatanya tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan perempuan di Indonesia.

### 3) Program Peningkatan Akses Keuangan

Di sektor kelautan dan perikanan, ADB memberikan kredit keuangan kepada nelayan di Aceh. Proyek ini bermula pada tahun 2013 ketika pemerintah Aceh dan pemerintah Sumatera Utara bermitra dengan ADB dan *Japan Fund for Poverty Reduction* (Dana Jepang untuk Pengentasan Kemiskinan, JFPR). Proyek ini menyediakan pinjaman dan pelatihan untuk warga miskin di dua propinsi tersebut, termasuk nelayan.

Aceh sebagai penghasil ikan tuna terbesar di perairan terdalam merupakan fokus program ADB dan JFPR untuk menjamin pasokan ikan tuna segar ke pasar global. Setelah mendapat pinjaman uang, nelayan bisa memodifikasi alat tangkap dengan mesin yang canggih, hasil tangkapan ikan tuna di Aceh kemudian dijual kepada perusahaan internasional yang bergerak di pengelolaan ikan bernama Nagata Prima Tuna. Perusahaan Nagata kemudian mengeksport ikan tuna tersebut ke Jepang, Korea Selatan, Thailand, Vietnam, Amerika Serikat dan Singapura.

Penerima manfaat proyek tersebut adalah nelayan laki-laki, dan bukan perempuan nelayan,

dan hasil tangkapan ikan diperuntukan kepentingan pasar global. Dengan demikian, proyek ini yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Aceh tidak menyentuh kepada akar persoalan kemiskinan, sebab meniadakan penerima manfaat perempuan nelayan, padahal perempuan adalah kelompok rentan yang dimiskinkan oleh struktur sosial budaya. Kemudian hasil tangkapan ikan untuk pasar global membuat ikan-ikan segar dijual kepada negara asing, sehingga ikan segar yang kaya protein dinikmati oleh warga dunia, sementara warga Aceh sendiri menikmati ikan-ikan yang rendah protein. Kondisi seperti ini akan menurunkan kualitas kesehatan warga Aceh, terutama anak-anak yang berada dalam taraf tumbuh kembang.

#### 4) Program Keuangan Mikro

Program keuangan mikro diperuntukkan secara khusus untuk perempuan yang memiliki usaha kecil. dan digagas oleh ADB untuk pemulihan mata pencaharian perempuan miskin setelah gempa dan tsunami tahun 2004. ADB berperan dengan memberikan bantuan teknis untuk membimbing bank-bank lokal yang ada di Aceh dan Sumatera Utara untuk mengembangkan produk keuangan lokal, dan memberikan penyuluhan keuangan kepada masyarakat miskin agar melek finansial. Program keuangan ini dikelola oleh bank daerah, yaitu Bank Sumut.

Bank Sumut memberikan pinjaman uang dengan bunga rendah bagi ibu rumah tangga atau anggota kelompok usaha yang memiliki usaha kecil. Pengembalian pinjaman dilakukan dalam bentuk cicilan atau kredit mingguan. Dan peminjaman dengan nominal besar dilakukan setelah pinjaman sebelumnya lunas.

Pemberian pinjaman uang dengan sistem bayar cicil di setiap minggunya kepada perempuan pelaku usaha yang terjadi di Sumatera Utara oleh Bank Sumut, sama halnya dengan bank *ucek-ucek* di Jawa Tengah yang memberi kan dana pinjaman kepada perempuan miskin. Bank yang demikian, sejatinya memberatkan perempuan miskin karena mereka akan terlilit hutang dengan bunga dalam jangka waktu yang lama. Fenomena bank *ucek-ucek* yang demikian merupakan lingkaran kemiskinan yang menjerat perempuan miskin tetap miskin selamanya.

### **3. Faktor-Faktor Ketimpangan Ekonomi di Indonesia**

Program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah dan swasta tidak menyentuh akar persoalan ketimpangan ekonomi yang dialami perempuan di Indonesia. Program-program seperti bantuan sosial, jaminan kesehatan nasional, perumahan subsidi, peminjaman keuangan mikro, Perhutanan Sosial, reforma agraria dan poros maritim dunia, justru melanggengkan kemiskinan itu sendiri. Sebab program-program pengentasan kemiskinan terse-

but tidak mampu mengurai persoalan ketimpangan ekonomi hingga ke akarnya. Dalam kajian feminime dengan menggunakan pendekatan interseksionalitas, akar ketimpangan ekonomi terjadinya kemiskinan ekstrem bagi perempuan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Sistem dan Budaya Patriarki

Budaya patriarki mendominasi lini kehidupan masyarakat Indonesia yang terimplementasi dalam berbagai lini kehidupan, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, agama dan politik. Berdasarkan hasil konsultasi yang telah dilakukan oleh Aksi! di 10 kota di Indonesia, budaya patriarki dalam kehidupan perempuan telah membuat perempuan termiskinkan sejak dalam lingkup terkecil, yaitu keluarga. Patriarki telah membuat relasi yang timpang antara suami dan istri, antara perusahaan dengan masyarakat adat, antara pemerintah dengan rakyat miskin. Sehingga penguasa, pemerintah dan laki-laki sebagai superior menominasi kekuasaan.

Contohnya, jika masyarakat yang menggantungkan hidup dari sawah dan lahan sebagai petani atau pekebun, kehilangan mata pencaharian akibat perampasan lahan oleh perusahaan untuk pelebaran kawasan perkebunan. Akibatnya, laki-laki atau suami yang oleh masyarakat dikonstruksi sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah kemudian berubah menjadi pengangguran. Ketika suami berstatus sebagai pengangguran yang sehari-hari

hanya duduk-duduk bersama sesama laki-laki pengangguran, kemudian berlanjut minum-minuman dan mabuk. Ketika pulang ke rumah dalam keadaan mabuk atau frustrasi dengan kondisi perekonomian keluarga, suami kemudian tidak segan melakukan pemukulan kepada istri sebagai pelampiasan luapan emosi atau amarah atau akibat dari pengaruh alkohol. Akibatnya suami sebagai pelaku kekerasan dan istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Fenomena KDRT yang demikian nyata terjadi hampir di 10 kota di Indonesia sebagai akibat dari perampasan sumber daya alam yang dilakukan oleh perusahaan dibantu oleh aparat pemerintah.

Ketika perempuan menjadi korban KDRT, perempuan dikonstruksi oleh budaya dan masyarakat juga agama untuk tidak melakukan perlawanan. Alih-alih perempuan membela dirinya dengan keluar dari lingkaran kekerasan, justru perempuan diuntut untuk taat dan patuh kepada suami sebagai kepala rumah tangga meskipun hidup dalam lingkaran kekerasan yang laten. Budaya patriarki menjadi sumber utama perempuan dimiskinkan oleh masyarakat, budaya, perusahaan dan negara.

#### b. Militerisme

Berdasarkan hasil konsultasi yang telah dilakukan oleh Aksi!, perampasan lahan oleh perusahaan dan negara di berbagai daerah di Indonesia dilakukan dengan cara-cara kekerasan, dan melibatkan

aparatus pemerintah. Realita yang demikian terjadi karena cara pandang yang militeristik bahwa konflik dan perlawanan perlu ditundukkan secara kekerasan dan kekuatan militer adalah pendukung kekuasaan.

Persoalan utama dalam kasus perampasan lahan dan tanah rakyat di Indonesia, adalah pola pendekatan kekerasan, seperti penculikan, penangkapan, penembakan, pembunuhan, pengrusakan, pengusiran/pengusiran, intimidasi dan pemaksaan lainnya. Militer adalah alat negara yang memiliki wewenang untuk menggunakan kekerasan dan senjata secara legitim, kemudian menjadi alat kekuasaan penguasa negara yang bekerja sama erat dengan korporasi untuk melindungi dan memaksakan kepentingan mereka.

Dalam konteks kasus perampasan sumber daya alam di Indonesia, militerisme adalah musuh demokrasi dan melanggar hak asasi manusia, membuat rakyat kehilangan jati dirinya sebagai warga negara yang memiliki hak untuk hidup berdaulat di negaranya sendiri. Rakyat miskin terutama perempuan akibat militerisme, menjadi tidak memiliki hak atas tanahnya sendiri, tidak memiliki akses atas sumber daya alam dan mengalami pemiskinan secara struktural. Perempuan menjadi korban pertama yang merasakan dampak penggunaan militerisme dalam kasus-kasus konflik sumber daya alam di Indonesia.

c. Ekonomi yang bergantung pada asing  
Kemiskinan perempuan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia dipicu oleh politik ekonomi pintu terbuka yang dianut oleh pemerintah Orde Baru pimpinan presiden Suharto sejak tahun 1966. Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1967 melancarkan investasi asing masuk ke Indonesia diiringi oleh pinjaman dari Bank Dunia, IMF dan ADB yang antara lain untuk menyiapkan infrastruktur di Indonesia agar investasi asing dan perdagangan bebas bisa beroperasi dengan mulus. Krisis ekonomi di tahun 1997 menyebabkan Indonesia tidak bisa membayar pinjaman luar negeri dan terpaksa minta bantuan penyesuaian struktural dari IMF agar bisa mendapatkan pinjaman untuk menutup pembayaran utang. Resep penyesuaian struktural dari IMF mendorong Indonesia untuk masuk kedalam perekonomian neoliberal yang bertumpu pada perdagangan bebas, swastanisasi perusahaan-perusahaan milik negara (seperti Perusahaan Air Minum, misalnya), deregulasi peraturan perundangan agar bisa mengakomodasi kepentingan perdagangan bebas dan investasi asing. Selain itu program penyesuaian struktural juga mendorong dihapusnya subsidi sosial yang dianggap tidak produktif misalnya untuk kesehatan dan pendidikan.

Akibat penerapan ekonomi neoliberal tersebut sumber daya alam menjadi milik swasta lewat Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1970 tentang Hak Pengusaha Hutan (HPH) dan Hak Pe-

mungutan Hasil Hutan (HPHH), pengkaplingan daerah tambang dan perkebunan, lain sebagainya. Dampak lain dari ekonomi neoliberal adalah kesenjangan ekonomi yang tinggi di Indonesia antara orang kaya dengan orang miskin. Berdasarkan catatan Forbes, terdapat total kekayaan kolektif 50 orang terkaya di Indonesia sebesar USD 180 miliar atau setara dengan Rp. 2.811 triliun dengan jumlah kekayaan terbanyak dipegang oleh Hartono dan keluarga. Jumlah indeks orang terkaya di Indonesia sebanyak 134.015 orang (data tahun 2021). Sedangkan indeks penduduk miskin di Indonesia tahun 2022 adalah 26,36 juta penduduk.

Sebagaimana mengutip dari Serikat Petani Indonesia bahwa dampak lain dari politik ekonomi neoliberal antara lain:<sup>19</sup> (1) monopoli dan dominasi pasar, sehingga berdampak kepada rendahnya upah bagi buruh perempuan, kebebasan pihak swasta membeli tanah-tanah petani untuk menjadi ladang bisnis sehingga tanah sawah dan ladang menyempit dan beralih fungsi, dan petani kehilangan mata pencaharian. (2) pengurangan biaya untuk fasilitas kesejahteraan umum seperti pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih dan sanitasi dan pembangunan daerah. Akibatnya pendidikan, kesehatan dan air minum harganya mahal. (3) privatisasi atau swastanisasi perusahaan milik negara dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi

<sup>19</sup> <https://spi.or.id/isu-utama/anti-neoliberalisme/>

pelayanan, seperti perusahaan air minum, listrik, sekolah, rumah sakit, bank, transportasi dan lain sebagainya. Akibatnya terjadi kelonjakan harga yang semuanya dibebankan kepada rakyat. Seperti harga bahan bakar minyak misalnya, yang pada tahun 2022 harganya naik fantastis tanpa subsidi, Ironisnya subsidi diberikan bagi pengendara roda empat (mobil), padahal realita yang ada masyarakat miskin paling mampu memiliki roda dua (motor). [A]

# Kesimpulan dan Rekomendasi

## **1. Kesimpulan**

Setelah melakukan kajian pustaka melalui analisa feminisme ekonomi dengan menggunakan pendekatan interseksionalitas, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan ekonomi dan gender di Indonesia atau realita kemiskinan yang dialami oleh perempuan di berbagai daerah di Indonesia merupakan kemiskinan struktural dan kemiskinan berlapis. Penguasa dan pemilik modal memegang kendali penuh terhadap kondisi kemiskinan yang terjadi. Untuk kepentingan investasi asing dan perdagangan bebas, penguasa dan pemilik modal mewajarkan tindakan kekerasan militeristik dalam merebut sumber daya alam tanpa mengindahkan konsep keadilan dan hak asasi manusia.

Kemiskinan yang dialami perempuan dalam berbagai lini kehidupan, bukanlah kemiskinan yang terjadi dengan sendirinya (takdir), melainkan kemiskinan yang terbangun untuk melanggengkan relasi yang timpang antara penguasa dan pemilik modal dengan masyarakat miskin. Kemiskinan akibat sebuah sistem ekonomi global yang dipromosikan oleh IMF, ADB dan Bank Dunia, dengan menggunakan kaki tangan pemerintah. Ironisnya, konstruksi kemiskinan tersebut menjadikan perempuan hidup miskin dalam strata sosial paling bawah.

Singkat kata, perempuan berada dalam lapisan dan kerak paling bawah dari kemiskinan struktural tersebut.

Tidak mudah bagi perempuan untuk keluar dari jeratan kemiskinan, sebab kemiskinan tersebut dikonstruksi dengan sedemikian rupa oleh sistem kapitalisme global dengan kebijakan ekonomi neoliberal, oleh kebijakan negara dengan jargon undang-undang, peraturan presiden dan peraturan daerah, dan oleh budaya patriarki yang melanggengkan relasi sosial yang timpang.

Bantuan sosial, infrastruktur, kesehatan, hutan, dan pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh IMF, ADB dan Bank Dunia hanyalah “*iming-iming*” agar masyarakat miskin tidak melakukan perlawanan sehingga *dinina-bobokkan* dan akhirnya merasa nyaman dengan kemiskinan yang dialami. Sebagaimana filosofi

masyarakat Jawa “menerima takdir” (*nrimo ing pandum*).

Maka untuk mengurai ketimpangan ekonomi dan gender di Indonesia atau untuk mengakhiri siklus kemiskinan yang dialami perempuan, bukanlah dengan memberikan bantuan baik berupa program keluarga harapan, akses kesehatan dengan bentuk jaminan kesehatan nasional, akses pendidikan dengan bantuan beasiswa dan lain sebagainya.

Akan tetapi dengan memberikan hak-hak yang dimiliki oleh perempuan, yaitu hak untuk mengolah tanahnya sendiri, hak untuk mengelola kekayaan laut, hak untuk memanfaatkan kekayaan hutan dan tidak mengeksploitasi sumber daya alam dalam kapasitas besar tanpa mengindahkan kelestarian lingkungan. Sebab penggerukan sumber daya alam baik batubara, emas, gas, nikel, dan lain sebagainya, juga alih fungsi hutan menjadi kebun sawit dan perkebunan skala besar lainnya, sejatinya bukan untuk kesejahteraan warga Indonesia melainkan untuk keamanan ketersediaan pasokan untuk pasar global. dan untuk kepentingan masyarakat dunia, sehingga yang merasakan manfaat dan keuntungan besar adalah kapitalis dan warga dunia, sedangkan warga Indonesia merasakan dampak berkelanjutan terjadinya kerusakan alam.

Kondisi yang demikian berdampak terhadap pemiskinan laten bagi perempuan di Indonesia, dan perempuan dimiskinkan oleh struktur sosial politik.

## 2. Rekomendasi.

Terdapat beberapa rekomendasi yang perlu untuk ditindak lanjuti dalam kajian Pustaka ini. Rekomendasi tersebut antara lain:

- a. Melaksanakan secara utuh pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi “Perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan”. Maksud dari pasal tersebut adalah sistem perekonomian yang digunakan dan dikembangkan seharusnya tidak menggunakan asas persaingan dan individualistik yang hanya mensejahterahkan korporat, melainkan asas kekeluargaan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia terutama rakyat fakir miskin.
- b. Mengembalikan tanah rakyat yang telah dirampas oleh perusahaan, sebab tanah adalah hak rakyat.
- c. Melarang aparat negara untuk melakukan pengusuran disertai dengan intimidasi dan kekerasan, sebab pengusuran melanggar hak asasi manusia.

[A]

## Daftar Pustaka

---

### Buku

- Budi Wahyuni, *Terpuruk Ketimpangan Gender*, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 1997.
- Heru Nugroho, *Kemiskinan, Ketimpangan dan Pemberdayaan*, dalam buku “Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia”, Awam Setya Dewanta (editor), Yogyakarta: Aditya Media, 1995.
- Loekman Soetrisno, *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Aktiva Primananda Hadiarta dkk, *Analisis Ketimpangan Gender Spasial dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Wilayah*, Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2022.
- Sabina Alkire dkk, *Unpacking Deprivation Bundles to Reduce Multidimensional Poverty: Global Multidimensional Poverty Index 2022*, OPHI dan UNDP.
- Mohammad Mulyadi, *Kemiskinan: Identifikasi Penyebab dan Strategi Penanggulangannya*, Jakarta: Publica Press, 2014.

- Mudrajat Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- World Bank, *Era Baru Pengentasan Kemiskinan diIndonesia*, Jakarta: World Bank, 2006.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Statistik Gender Tematik-Potret Ketimpangan Gender Dalam Ekonomi*, Jakarta: Lintas Khatulistiwa, 2016.
- Era Herisna, *Investasi pada Lembaga Keuangan Internasional, Apa Keuntungannya Bagi Indonesia?*, dalam “Kerjasama Multilateral Indonesia di Sektor Keuangan”, Adi Budiarmo (edit), Bogor: IPB Press, 2019.
- Asian Development Bank, *Strategi 2030: Mencapai Asia dan Pasifik yang Makmur, Inklusif, Tangguh dan Berkelanjutan*, Manila: ADB, 2018.

## **Jurnal/Hasil Penelitian**

- Gadis Arivia, *Perspektif Feminisme: Interseksionalitas dan Covid-19*, dalam Jurnal Perempuan edisi 107, Vol.25 No. 4, November 2020.
- Darmawan Triwibowo, *Kerentanan Perempuan Terhadap Kemiskinan: Temuan Empiris dan Tantangan Pengarusutamaan Gender*, Jurnal Perempuan edisi 74 Vol 17 no. 3 September 2012.
- United Nation Economic Commission for Europe, *Measuring Gender Equality in the Economy*, Research Report UN, 2009.

Gunzeli Berik dkk, *Feminist Economics of Inequality, Development and Growth*, dalam Jurnal Feminist Economics, Vol 15 (3), Jul 2009.

Maria SAGRARIO FLORO dan John Willoughby, *Feminist Economic and the Analysis of the Global Economy: the Challenge that Awaits Us*, dalam The Fletcher Forum of World Affairs, Vo. 40:2 Summer 2016.

Ari Mulianta Ginting, *Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Terhadap Kemiskinan di Indonesia 2004-2013*, dalam jurnal Kajian MPR RI, Vol 20 No. 1 Maret 2015.

## **Dokumen/Laporan**

Titi Soentoro dan Marhaini Nasution, *Potret Perempuan dalam Ketidakadilan Gender dan Ekonomi di Indonesia, Prosiding Konsultasi Lokal di 10 Kota*, Desember 2022.

Ni Ketut Suidiani dll, *Notulensi Konsultasi Nasional "Keadilan Gender dan Ekonomi untuk Perempuan"*, 67 Maret 2022.

Laporan Khusus Ketimpangan Ekonomi, *Kaya Raya Miskin Papa*, Majalah Tempo edisi 2026 Maret 2017.

Luke Gibson, *Laporan Ketimpangan Indonesia, Menuju Indonesia yang Lebih Setara*, Jakarta: OXFAM Indonesia, 2017.

Lucas Chancel dkk, *World Inequality Report 2022*, World Inequality Lab UNDP.

*Document of The World Bank Group for the Republic of Indonesia for the Period 2021-2025.*

IMF Country Report no. 22, *Indonesia Selected Issues*, International Monetary Fund, Washington D.C.

### **Media online**

<https://bisnis.tempo.co>

<https://hdr.undp.org>

<https://www.bps.go.id>

<https://www.kominfo.go.id>

<https://unstats.un.org>

<https://www.sdg2030indonesia.org>

<https://perpustakaan.bappenas.go.id>

<https://www.jawapos.com>

<https://bbppksmakassar.kemensos.go.id>

<https://www.kemenpppa.go.id>

<https://kemlu.go.id/>

<https://www.bi.go.id>

<https://www.worldbank.org>

<https://www.imf.org>

<https://id.wikipedia.org>

<https://www.adb.org/>

[a]

## Profil Penyusun

---

**MASTHURIYAH SA'DAN** adalah peneliti independent untuk kajian perempuan dan minoritas gender, sarjana filsafat di Institut Dirosat Islamiyah AlAmien (2010) dan magister filsafat Islam di UIN Sunan Kalijaga (2014). Saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral di fakultas filsafat Universitas Gadjah Mada. Telah mempublikasikan beberapa jurnal dan esai tentang feminisme Islam, gender dan perempuan, antara lain buku trilogi waria Santri Waria (2020), Solidaritas Waria (2021) dan Spiritualitas Waria (2022). Kini sedang proses publikasi buku biografi tokoh teolog feminis pertama di Indonesia Nunuk Prasetyo Murniati.

[A]

**KETIMPANGAN** gender dan ekonomi serta kemiskinan memang sebuah realitas yang dihadapi rakyat Indonesia, terutama perempuan. Di beberapa kota, kami menemukan keragaman kausalitas kemiskinan perempuan, seperti upah buruh perempuan yang rendah; kehilangan mata pencaharian akibat kerusakan alam di sekitarnya oleh penebangan hutan, eksploitasi tambang, alih fungsi lahan ke kebun sawit ataupun akibat reklamasi pantai dan banjir rob yang menenggelamkan rumah warga di pesisir pantai. Kerusakan alam juga menghilangkan sumber air bersih. Kehilangan tersebut dan kenaikan biaya rumah tangga akibat harga bahan pokok yang melambung tinggi, mendorong banyak perempuan meminjam uang ke lintah darat dengan bunga tinggi sehingga mereka perempuan terlilit utang.

Selain itu, kasus KDRT yang dialami oleh perempuan tetap tinggi. Hasil konsultasi-konsultasi perempuan tersebut memperlihatkan bahwa ketimpangan gender dan ekonomi serta pemiskinan perempuan adalah persoalan struktural, akibat dari kebijakan pembangunan negara.

Memang banyak program pengentasan kemiskinan, tapi tidak menyentuh akar penyebab kemiskinan itu sendiri. Malahan, banyak program bantuan pengentasan kemiskinan lewat lembaga keuangan internasional yang nyatanya punya agenda kepentingan eksploitasi sumber daya alam Indonesia dan menjamin pasokan ke pasar global.



Co-funded by  
the European Union